POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA "BEBAS AKTIF"

DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana strata satu

(S1) dalam Program Studi Filsafat Politik Islam

Oleh:

Hozin Zainullah

NIM: E04213034

PROGRAM STUDI FILSAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hozin Zainullah
NIM : E04213034
Program Studi : Filsafat Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

dengan ini menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Januari 2019
Saya yang menyatakan,

Hozin Zainullah
NIM: E04213034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Hozin Zainullah ini telah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 19 Januari 2019

Pembimbing

Moh. Fathoni Hakim, M.Si
NIP: 198401052011011008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Hozin Zainullah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 6 Februari 2019

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Dekan,

Dr. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP: 196409181992031002

Tim Peguji
Penguji I,

M. Fathoni Hakim, M.Si
NIP: 198401052011011008

Penguji II,

Laili Bariroh, M.Si
NIP: 197711032009122002

Penguji III,

Dr. Aniek Nurhayati, M.Si
NIP: 196909071994032001

Penguji IV,

M. Anas Fakhruddin, M.Si
NIP: 198202102009011007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hozin Zainullah
NIM : E04213034
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Filsafat Politik Islam
E-mail address : hozinplay@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA "BEBAS AKTIF" DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

(Hozin Zainullah)
E04213034

ABSTRAK

Judul : Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas Aktif" dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya
Penulis : Hozin Zainullah
Pembimbing : Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
Keyword : Konflik Rohingya, Kebijakan Luar Negeri, Presiden Jokowi, Prinsip Bebas-Aktif

Penelitian ini dilatar belakangi oleh krisis kemanusiaan di Myanmar serta keterlibatan secara aktif pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam upaya penyelesaian krisis tersebut. Untuk memfokuskan pembahasan, peneliti mengkhusus kajian pada bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap isu Rohingya dan bagaimana Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo menerjemahkan prinsip bebas-aktif di dalam kebijakan luar negeri dalam merespon isu Rohingya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatana kualitatif, kemudian diperkuat dengan penelusuran data melalui sumber primer, dalam hal ini Direktur dan Wakil Direktur Asia Tenggara Direktorat Jenderal Asia Pasifikdan Afrika Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara, dan diperkuat dengan sumber sekunder berupa buku, laporan penelitian-penelitian terkait, maupun informasi media massa. Selain itu, penelitian ini juga menjadikan konsep kebijakan luar negeri perspektif K.J. Holsti sebagai instrumen analisis untuk mengungkap dan menjawab dua pertanyaan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Dari proses riset yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta, bahwa: *Pertama*, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal, meliputi: 1) *national interest*, tercermin dari dorongan masyarakat muslim Indonesia agar pemerintah Indonesia menyelesaian konflik dan melindungi etnis muslim Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek *teritorial security* maupun ekonomi; 4) ujian kredibiltas ASEAN, yang selama ini dianggap lemah, sehingga memaksa Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di ASEAN turun tangan; 5) tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia; 6) faktor pengambil keputusan, yaitu pertimbangan rasional seorang Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatar belakang pengusaha. *Kedua*, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Jokowi menerjemahkan prinsip bebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung kepada kepentingan negara-negara *the big power* dalam dinamika konflik di Myanmar. Upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah dengan bersikap moderat dan tidak setengah hati dalam merealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

LEMBAR PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI ix

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Tinjauan Pustaka 9

F. Metode Penelitian 14

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II: TINJAUAN TEORITIK 19

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri 20

B. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 28

BAB III: KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEBIJAKAN MERESPON ISU ROHINGYA 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Struktur, Tugas, dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI 40
B. Riwayat Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi terkait Isu Kemanusiaan dan HAM 44
C. Sejarah Konflik Rohingya 48
D. Kepentingan Nasional Indonesia dan ASEAN 50
BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS-AKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA 60
A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Isu Rohingya 61
B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 71
BAB V: PENUTUP 77
A. Kesimpulan 77
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80
LAMPIRAN 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, secara implisit, prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[1] Kemudian secara eksplisit, baru tersampaikan dua tahun setelah Indonesia merdeka oleh Sutan Sjahrir ketika ditugaskan Presiden Soekarno untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional[2] pada saat *Inter Asia Relations Conference* di New Delhi:

> Dunia tampaknya memaksa kita untuk membuat pilihan antara kekuatan yang saling bermusuhan sekarang: antara blok Anglo Saxon dan Soviet Rusia. Tetapi kita secara benar menolak untuk dipaksa. Kita mencari wujud internasional, yang sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita tidak ingin terperangkap dalam sistem-sistem yang tidak cocok dengan kita dan tentu saja tidak ke dalam sistem-sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita.[3]

Pandangan demikian diperkuat oleh Moh. Hatta melalui pidatonya yang berjudul *Mendayung Di Antara Dua Karang* di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948.[4]

---

[1] Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

[2] Kementerian Luar Negeri RI, *Biju Patnaik: Pahlawan Bersama India, Indonesia*, 11 Desember 2017, diakses pada 4 Juni 2018, https://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Biju-Patnaik,-Pahlawan-Bersama-India,-Indonesia.aspx.

[3] Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Desember 2014, Vol. IV, No. II, 23.

[4] Agus Budi Yulianto, "Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)", (Skripsi—Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, politik "bebas" berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan istilah "aktif" berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.[5]

Tidak puas dengan itu, Presiden Soekarno menegaskan kembali prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia melalui Manifesto Politik. Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) yaitu pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959, dengan perinciannya oleh DPA, beserta pedoman-pedoman pelaksanaannya, telah disahkan sebagai Garis Besar Haluan Negara oleh sidang pertama MPRS pada 19 November 1960.[6]

Tentu dalam pelaksanaan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang paling jelas terlihat pada adanya Konferensi Asia-Afrika yang merupakan bagian dari gerakan non-blok dengan Presiden Soekarno sebagai inisiatornya. Gerakan non-blok adalah sikap politik Indonesia melihat rivalitas yang cukup tinggi antara dua blok besar dunia: Blok Barat dengan Blok Timur.

Dalam perkembangannya, prinsip ini terus dijalankan oleh pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan setelah Soekarno. Akan tetapi dengan penerjemahan yang berbeda, dan tentu mengikuti pemahaman dan arah kebijakan politik yang menyertainya, mulai dari kepemimpinan Soeharto di era orde baru hingga kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini. Dalam memandang krisis kemanusiaan di Myanmar, misalnya, Presiden Jokowi secara langsung mendatangi lokasi penampungan pengungsi etnis

[5] Mohammad Hatta, *Mendayung di Antara Dua Karang*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), 17.
[6] D.N. Aidit, *PKI dan AURI*, (Jakarta: Jajasan Pembaharuan, 1963), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rohingya dari Rakhine State yang ada di Kamp Jamtoli, Sub Distrik Ukhiya, Cox's Bazar, Bangladesh.[7]

Kelompok etnis Rohingya merupakan salah satu bagian dari keberagaman etnis yang ada di Myanmar. Etnis ini menjadi satu-satunya kelompok dengan populasi paling sedikit di antara kelompok etnis lainnya, dan hampir seluruh masyarakatnya merupakan pemeluk agama Islam. Nama "Rohingya" menjadi populer sejak banyak mengisi halaman berita di berbagai media, baik nasional maupun internasional. Hal ini berkaitan dengan krisis yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya di Myanmar dua tahun terakhir. Bahkan menurut Duta Besar Indonesia Ito Sumardi Djunisanyoto, bahwa sejak 1970-an, hampir 1 juta muslim Rohingya mengungsi dari Myanmar lantaran persekusi negara yang sistematis dan meluas.[8]

Adapun krisis yang sedang menimpa kelompok etnis Rohingya adalah serangkaian konflik yang terjadi sejak tahun 2012. Kala itu, konflik terjadi antara kelompok etnis Rohingya dengan etnis Rakhine (Buddhist), yang bermula dari kasus pemerkosaan hingga pembunuhan oleh beberapa pemuda Rohingya kepada salah seorang perempuan Rakhine. Sehingga berbuntut pada upaya pembalasan oleh kelompok etnis Rakhine dengan membunuh, membakar rumah, hingga pengusiran terhadap kelompok etnis Rohingya.

---

[7] Ahmad Faiz Ibnu Sani, "Presiden Jokowi Temui Etnis Rohingya di Tempat Pengungsian", *Tempo*, 28 Januari 2018, diakses pada 4 Juni 2018, https://nasional.tempo.co/read/1054962/presiden-jokowi-temui-etnis-rohingya-di-tempat-pengungsian.

[8] Dubes RI Ito Sumardi Djunisanyoto dalam Ardi Sumandoyo, "Krisis Rohingya Bukan Konflik Agama", *Tirto*, 6 September 2017, diakses pada 18 April 2018, https://tirto.id/krisis-rohingya-bukan-konflik-agama-cv3i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kerusuhan antar-kedua kelompok agama itu semakin memburuk, sejak pemerintah mendeklarasikan status darurat atas Rakhine sehingga melegalkan intervensi militer (disebut Tatmadaw) dalam "menangani" kerusuhan komunal berdimensi agama itu.[9] Dalam proses penanganan konflik oleh aparat militer, persoalan yang menjadi sumber konflik tak kunjung mereda. Justru ada ketimpangan pada proses penanganan konflik, di mana aparat militer ikut serta dalam gelombang pengusiran, pembunuhan, bahkan pemerkosaan terhadap kelompok etnis Rohingya.

Keterlibatan aparat militer dalam pengusiran kelompok etnis Rohingya seolah menggambarkan bahwa pemerintahan telah memberikan legitimasi bagi kelompok Rakhine untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok etnis Rohingya. Tindak kekerasan atau penggunanaan aspek koersif melalui lembaga negara bukanlah sebuah hal baru yang menjadi cara bagi negara-negara tertentu untuk mengurangi segmen populasi mereka.[10] Pada akhirnya, kelompok etnis Rohingya terpaksa untuk meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke beberapa negara tetangga, seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia dan Indonesia, untuk mencari perlindungan setelah diperlakukan secara diskriminatif dan kemudian diusir oleh pemerintahan Myanmar.

Negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia menjadi negara jujukan utama para pengungsi Rohingya, mengingat negara tersebut merupakan wilayah dengan populasi Muslim yang cukup besar.

---

[9] Sumanto Al Qurtuby, "Sejarah Kelam Muslim Rohingya", *DW*, 18 September 2017, diakses pada 17 April 2018, http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421.

[10] Baiq Wardhani, "No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar", *Jurnal Global dan Strategi: Edisi Khusus*, 2012, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga para pengungsi berharap perlindungan dan keamanan melalui ikatan solidaritas sesama Muslim, terutama sekali di Bangladesh sebagai negara terdekat dan dengan basis masyarakat yang cukup besar.

Berkaitan dengan gelombang pengungsi yang terus-menerus berdatangan, langkah pemerintah Indonesia salah satunya—melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi—mendorong terjalinnya *MoU* atau nota kesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Banglades terkait upaya repatriasi para pengungsi etnis Rohingya.[11] Hal demikian juga bagian langkah untuk mngantisipasi dampak konflik merembet hingga ke Indonesia.

Dalam merespon konflik etnis yang terjadi di Myanmar, kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia menjadi sangat penting. Khususnya berkaitan dengan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan pasca datangnya gelombang pengungsi di Indonesia, kepentingan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar untuk membantu menyelematkan komunitas Muslim Rohingya dari penindasan dan tindakan represif oleh pemerintah Myanmar, dan kepentingan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan bilateral yang sudah terjalin bersama Myanmar.

Pada dasarnya, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam ikut serta mengupayakan perdamaian di Myanmar juga dilandasi prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagaimana pernyataan Menko Polhukam RI, Wiranto, bahwa pemerintah mengimplementasikan politik luar

---

[11] Kristian Erdianto, "Indonesia Dorong Kebijakan Repatriasi Bagi Pengungsi Rohingya di Banglades", *Kompas*, 23 November 2017, diakses pada 18 April 2018, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/13513321/indonesia-dorong-kebijakan-repatriasi-bagi-pengungsi-rohingya-di-banglades.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia, termasuk dalam merespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar.[12]

Akan tetapi, pengimplementasian politik bebas-aktif tersebut, tentu dengan penafsiran yang berbeda dengan apa yang pernah dihayati dalam kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan sebelumnya. Sehingga, penerjemahan yang berbeda terhadap prinsip politik bebas-aktif berimplikasi pada perumusan kebijakan luar negeri yang berbeda pula.

Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi adalah melalui diplomasi kemanusiaan, yang dalam proses tersebut menawarkan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen ini terdiri dari: (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.[13] Di samping diplomasi terus-menerus dilakukan, baik secara langsung maupun melalui organisasi regional dan internasional, Indonesia pada saat yang sama, terus memberikan bantuan kepada korban di Myanmar, mulai dari logistik, akses pendidikan hingga akses kesehatan.

---

[12] Kristian Erdianto, "Jangan Lihat Isu Rohingya sebagai Konflik antara Islam dan Buddha", *Kompas*, 6 September 2017, diakses pada 11 September 2018, https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/06410621/jangan-lihat-isu-rohingya-sebagai-konflik-antara-islam-dan-buddha?page=all.

[13] Kementerian Luar Negeri RI, *Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar*, 4 September 2017, diakses pada 11 September 2018, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa kebijakan tersebut, menjadi penting bagi peneliti untuk menelusuri apa faktor yang mempengaruhi diambilnya sebuah keputusan luar negeri. Di antaranya adalah faktor kebutuhan nasional yang tercermin pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk bersimpati terhadap konflik dan pengungsi Rohingya. Kemudian faktor kepentingan Indonesia untuk mengamankan keamanan teritorial dari ancaman kejahatan dan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh penyebaran pengungsi, dan mengamankan stabilitas politik demi keberlanjutan program pembangunan nasional maupun investasi di negara-negara regional. Selanjutnya, faktor tekanan internasional yang mengharuskan Indonesia untuk tampil aktif di tengah absennya ASEAN dalam penyelesaian konflik. Dan terakhir, adalah faktor pengambil kebijakan, dalam hal ini Presiden Jokowi, yang dikenal sebagai pemimpin populis.

Kenyataan demikianlah yang melatar belakangi peneliti untuk mendalami bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menerjemahkan prinsip politik bebas aktif dalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang telah dilakukan untuk mengupayakan perdamaian atas konflik yang menimpa kelompok etnis Rohingya di Myanmar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang dan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana menerjemahkan prinsip “bebas-aktif” pada kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui latar belakang dan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya; dan
2. Memahami makna prinsip “bebas-aktif” pada kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Salah satunya dapat memberikan uraian tentang kebijakan luar negeri Indonesia di era Jokowi, khususnya dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya melalui penekanan prinsip politik bebas aktif. Hal ini menjadi penting bagi mahasiswa dengan minat dan fokus studi pada kajian ilmu sosial dan politik untuk dapat mengidentifikasi prinsip politik bebas aktif dalam kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan erat dengan krisis kemanusiaan di Myanmar. Sehingga, selanjutnya, dapat mendalami, mengembangkan atau bahkan membantah temuan yang dihasilkan dari penelitian ini melalui penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang penerjemahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip bebas aktif di dalam politik luar negeri Indonesia, kaitannya dengan penyelesaian konflik di Rohingya. Sehingga masyarakat mampu memahami dan, lebih lanjut, mendukung upaya tersebut dengan ikut terlibat secara aktif menyuarakan perdamaian dunia, khususnya pada konflik yang sedang menimpa komunitas muslim Rohingya.

E. Tinjauan Pustaka

1. Skripsi Diah Nurhandayani (2013) berjudul "Kebijakan Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Penyelesaian Kekerasan Etnis Muslim Rohingya di Myanmar"[14]

   Dalam penelitian skripsi Diah, menjelaskan posisi Indonesia di bawah pemerintahan SBY sebagai salah satu negara yang disegani di ASEAN, namun tidak tegas dan tidak konsisten untuk membantu krisis kemanusiaan di Myanmar pada saat masyarakat dan Ormas di Indonesia lantang menyuarakan dukungannya. SBY dianggap lebih menjaga stabilitas hubungan bilateral dengan Myanmar demi kepentingan nasional.

   Tentu berbeda dengan rencana penelitian ini, yang lebih memusatkan perhatian terhadap kepemimpinan Jokowi dalam menyikapi krisis Rohingya, dan di saat yang sama, berusaha untuk menerjemahkan prinsip Bebas-Aktif dalam politik luar negeri Indonesia.

2. Skripsi Indah Angraini Sawal (2017) dengan judul "Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar terhadap Negara-Negara ASEAN"[15]

---

[14] Diakses melalui Digital Library UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, file:///C:/Users/12345/Downloads/DIAH%20NURHANDAYANI%20(1).pdf.

[15] Repository Universitas Hasanuddin Makassar, http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25716.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian tersebut menjelaskan, bahwa konflik yang terjadi pada etnis Rohingya telah mengakibatkan krisis kemanusiaan. Sehingga masyarakat etnis Rohingya yang merupakan komunitas muslim menjadi korban dan terpaksa harus mengungsi dan mencari suaka di negara-negara tetangga. Negara tujuan para korban krisis kemanusiaan Rohingya ini rata-rata merupakan negara yang sebelumnya telah tergabung dalam organisasi ASEAN. Sehingga tentu memberikan dampak dan pengaruh terhadap kebijakan negara-negara ASEAN dalam merespon krisis kemanusiaan Rohingya dan sekaligus untuk bersikap atas gelombang pengungsi yang masuk ke negara-negara terkait.

Sedangkan dalam rencana penelitian ini, lebih fokus untuk menafsirkan prinsip politik bebas aktif pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sehingga upaya untuk menyelesaikan konflik Rohingya oleh pemerintah Indonesia dapat ditelisik, tidak hanya berdasar pada ikatan solidaritas sesama masyarakat Muslim di Indonesia dengan komunitas Muslim Rohingya, melainkan juga berlandaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, di mana prinsip tersebut dirasa masih relevan sejak Indonesia di bawah pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan Jokowi sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jurnal Fatma Arya Ardani (2015) berjudul "Kebijakan Indonesia dalam Membantu Penyelesaian Konflik antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar (Studi Karakter Kepribadian Susilo Bambang Yudhoyono)"[16]

   Penelitian tersebut menjadikan akar konflik antar etnis yang terjadi di Myanmar tahun 2012 sebagai perhatian utama, di mana konflik tersebut merupakan akar dari permasalahan yang berujung pada krisis kemanusiaan berkepanjangan di Myanmar, bahkan hingga hari ini. Konflik tersebut terjadi antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine di wilayah Arakan, wilayah yang menjadi tempat tinggal dua etnis tersebut. Bermula dari konflik itulah pemerintah Indonesia era Susilo Bambang Yudhoyono gencar melakukan beberapa kebijakan sebagai bagian dari usaha untuk ikut serta menyelesaikan konflik yang menyebabkan komunitas muslim Rohingya mengungsi ke Malaysia, Kamboja dan negara-negara tetangga lainnya.

   Akan tetapi, analisis pada penelitian tersebut lebih memusatkan perhatian pada karakteristik kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono yang memengaruhi perumusan kebijakannya dalam mengupayakan perdamaian di Myanmar. Tentu sangat berbeda dengan rencana penelitian ini, yang lebih mengupayakan untuk menerjemahkan prinsip politik bebas dan aktif pada kebijakan luar negeri Indonesia. Sehingga, dalam argumen sementara, prinsip tersebut juga dianggap sebagai faktor yang

[16] Journal of International Relations, 2015, Vol. 1, No. 2. Diakses melalui http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam upayanya menyelesaikan konflik Rohingya.

4. Jurnal Hendra Maujana Saragih (2017) dengan judul "Indonesia dan *Responsibility to Protect* Etnis Muslim Rohingnya Myanmar"[17]

Tidak jauh berbeda dengan dua penelitian di atas, pengamatan Saragih juga tertuju pada konflik di Myanmar yang menyebabkan komunitas muslim Rohingya menjadi kelompok marjinal, sehingga terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga menggunakan perahu. Marjinalisasi terhadap kelompok sebagaiman dimaksud dilakukan dengan beragam bentuk dan cara, salah satunya dengan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai bagian dari keberagaman etnis di Myanmar oleh junta militer. Selanjutnya, perhatian Saragih juga tertuju pada respon Indonesia terhadap konlik di Myanmar sebagai sesama anggota ASEAN.

Perbedaan antara penelitian Saragih dengan rencana penelitian ini adalah terletak pada kebijakan luar negeri Indonesia sebagai obyek pengamatan, yang menjadikan kebijakan era Susilo Bambang Yudhoyono dengan kebijakan era Jokowi sebagai obyek pengamatan sekaligus. Hal itu tidak menjadi rencana penelitian ini, sebab hanya akan spesifik menerjemahkan prinsip politik bebas aktif pada kebijakan luar negeri Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa komunitas muslim Rohingya di Myanmar.

[17] Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2017, Vol. 2, No. 2, P3M STAIN Curup - Bengkulu. Diakses melalui, http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jurnal Budi Hermawan Bangun dengan judul "Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya"[18]

   Budi, dalam penelitiannya, mengungkap kesulitan ASEAN sebagai organisasi regional dalam melakukan penanganan pengungsi Rohingya, yang disebabkan oleh adanya prinsip non-intervensi sebagaimana dalam Piagam ASEAN. Sehingga, dalam upaya penanganan tersebut, ASEAN memerlukan mekanisme yang didasarkan pada kesepakatan negara anggota dan hukum internasional terkait.

   Hal demikian tentu berbeda dengan prinsip politik bebas-aktif Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam upaya membantu krisis yang terjadi di Myanmar sebagai obyek penelitian ini. Meskipun dalam pembahasan lebih lanjut tetap akan mengulas beberapa hal yang berkaitan dengan tema penelitian Budi.

6. Jurnal Syarifatul Ula (2017) dengan judul "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar"[19]

   Syarifatul memaparkan tentang Human Rights Watch, sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi kemanusiaan, telah mengupayakan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. Melalui pengumpulan informasi serta identifikasi di wilayah-wilayah konflik etnis Rohingya yang selanjutnya mendistribusikan informasi

---

[18] Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2017, Vol. 4, No. 3. Diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14929.

[19] Journal of International Relations, 2017, Vol. 3, No. 3. Diakses melalui http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut kepada masyarakat internasional melalui media untuk mendapat perhatian publik berkaitan dengan krisis kemanusiaan yang terjadi.

Jika Syarifatul mengamati keterlibatan aktor non-negara dalam penyelesaian konflik Rohingya, maka dalam penelitian ini mengamati keterlibatan negara Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar menggunakan prinsip politik Bebas-Aktif.

7. Laporan Penelitian M. Fathoni Hakim (2018) berjudul "Multy-Track Diplomacy dalam Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar: Sebuah Analisis terhadap Diplomasi Indonesia"

Dalam laporan tersebut, Fathoni memerhatikan konflik Rohingya dalam konteks diplomasi pemerintah Indonesia yang melalui berbagai macam jalur, baik oleh pemerintah langsung maupun melibatkan aktor non-pemerintah (NGO).

Meski sama-sama mengamati langkah pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo dalam merespon isu Rohingya, tentu berbeda dengan rencana penelitian yang akan dilakukan peneliti yang lebih fokus pada kebijakan luar negeri Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam rencana penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang dalam prosesnya lebih mengamati data berupa pernyataan verbal, dan sikap pemaknaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan numerik atau angka-angka,[20] dan mengutamakan pola penggambaran dan penjelasan keadaan dan fakta empiris yang terjadi di Myanmar, kebijakan luar negeri Indonesia serta telaah historis terhadap prinsip politik bebas aktif, secara deskriptif. Selanjutnya, tampilan data yang telah dideskripsikan sebelumnya akan dianalisis menggunakan beberapa pendekatan yang telah ditentukan.

2. Jenis Data

Data yang digunakan sebagai obyek analisis dalam rencana penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, merupakan data valid yang diperoleh dari pihak pertama, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri RI sebagai bagian dari pemerintah eksekutif. Sedangkan data sekunder, adalah teks dan gambar yang diperoleh dari temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam buku maupun paper, dan informasi yang dilaporkan media massa, baik cetak maupun online.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan penelusuran melalui sumber tertulis.

Pertama, interview atau wawancara, yang dilakukan oleh peneliti terhadap individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Rohingya. Dalam proses wawancara, subyek penelitian atau informan harus jelas,

[20] Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarsin, 1996), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mengetahui bagaimana latar belakang informan tersebut.[21] Dalam hal ini, wawancara dilakukan bersama: 1) Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI; dan 2) Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI.

Penentuan informan/narasumber dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan kredibilitas Direktorat Asia Tenggara sebagai salah satu unit kerja Kementerian Luar Negeri RI yang berkaitan sccara langsung dengan isu Rohingya. Sehingga peneliti sudah memilih informan yang jelas beserta menyiapkan *guide interview* sesuai dengan data yang diinginkan peneliti.

Peneliti memilih bentuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang diperoleh langsung dengan cara bertatap muka dengan informan dan memberikan pertanyaan sesuai dengan *guide interview* yang sudah peneliti siapkan. Wawancara ini dilakukan dengan maksud ingin mendapatkan gambaran secara lengkap tentang topik yang diteliti.[22] Wawancara mendalam ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Kedua, dokumentasi, atau cara pencarian data di lapangan yang bisa berbentuk gambar, arsip dan data-data tertulis lainnya. Peneliti perlu mengambil gambar selama proses penelitian berlangsung untuk

[21] Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.
[22] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktuaisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gambaran secara riil yang terjadi di lapangan berkaitan dengan permasalahan yng terjadi didalam masyarakat.[23]

Ketiga, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian pustaka, di mana setiap data didapat melalui penelusuran pada berbagai sumber terpercaya, baik buku, jurnal, artikel, media cetak, situs berita online, maupun berbagai data lainnya yang berkaitan erat dan relevan dengan tema penelitian, dan kemudian dikonfirmasi dengan data yang telah diperoleh dari sumber pertama melalui proses wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, teknik yang penulis pakai adalah teknik analisis kualitatif. Secara teknis, pokok permasalahan yang diteliti digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang telah ditampilkan melalui data-data petunjuk. Pendeskripsian fakta yang satu dihubungkan dengan fakta lainnya melalui pendekatan yang ditentukan. Sehingga menunjuk pada sebuah temuan baru.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan pada penelitian ini adalah metode deduktif, penggambaran secara umum masalah yang diamati oleh peneliti, kemudian menampilkan kesimpulan secara khusus setelah proses analisis data.

G. Sistematika Pembahasan

[23] Suharsimi Arikunto. 2005. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika pembahasan dibutuhkan untuk mengatur pembahasan demi pembahasan dalam penelitian ini, sehingga tersusun secara sistematis dan rapi. Sehingga memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menampilkan tahap demi tahap dalam penelitian, serta memberikan kemudahan bagi pembaca untuk memahami secara runtut. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari:

1. Bab pertama, yang berisi pendahuluan dan gambaran umum dari rencana penelitian ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, menampilkan kerangka teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam proses analisis data. Dalam hal ini adalah telaah historis pada prinsip politik bebas aktif disertai argumen dan pandangan tokoh-tokoh pendiri bangsa, seperti Soekarno dan Moh. Hatta.
3. Bab ketiga, mendeskripsikan permasalahan di Myanmar yang menjadi topik utama penelitian secara lebih mendalam, dilanjutkan dengan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia untuk merespon permasalahan.
4. Bab keempat, memuat proses analisis data yang telah ditampilkan pada bab sebelumnya melalui pendekatan teori yang juga telah ditentukan pada bab kedua. Sehingga memunculkan temuan dan hasil dari penelitian.
5. Bab terakhir, memberikan kesimpulan terhadap rangkaian proses penelitian sehingga menjawab pertanyaan mendasar yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicantumkan dalam rumusan masalah, berikut saran yang konstruktif-informatif terhadap persoalan yang telah selesai diamati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN TEORITIK

Pada bab ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan, *pertama*, konsep kebijakan luar negeri dalam perspektif K.J. Holsti sebagai instrumen analisis kebijakan luar negeri Indonesia. Deskripsi mengenai konsep kebijakan luar negeri menjadi penting untuk dapat melihat faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia terhadap isu Rohingya, baik faktor eksternal maupun internal.

Faktor internal adalah segala sesuatu yang mendasari diambilnya sebuah keputusan, yang itu muncul dari situasi dan kondisi dalam negeri (lingkungan nasional). Banyak sekali aspek yang masuk dalam kategori lingkungan nasional, termasuk di dalamnya adalah kepentingan nasional dan kebutuhan nasional. juga aspek personalitas seorang pemimpin sebagai aktor pengambil keputusan masuk di dalam faktor internal ini. Sedangkan faktor eksternal adalah sesuatu yang mempengaruhi diambilnya sebuah keputusan, yang itu muncul dari keadaan luar negeri, baik di lingkungan regional maupun lingkungan global. Salah satunya seperti tekanan masyarakat internasional dan sebagainya.

Peneliti merasa, bahwa konsep kebijakan luar negeri perspektif K.J. Holsti adalah satu dari sekian banyak konsep tentang kebijakan luar negeri yang paling membantu dalam upaya peneliti menjelaskan proses hingga diputuskannya sebuah kebijakan, dalam hal ini kebijakan luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam merespon isu Rohingya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian, *kedua*, uraian mengenai penggunaan prinsip bebas-aktif sebagai dasar filosofis politik luar negeri Indonesia, konteks sejarahnya, beberapa komponen yang melandasinya, hingga kecenderungan yang berbeda oleh tiap-tiap pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam menerjemahkan prinsip bebas-aktif terhadap isu Rohingya. Sehingga pada tahap selanjutnya, dapat ditemukan posisi Indonesia di tengah perhatian masyarakat dunia terhadap perkembangan dan upaya-upaya penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar.

A. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep tentang kebijakan luar negeri adalah panduan, prinsip dan tujuan dari keputusan suatu negara dalam mengupayakan kepentingan negara di kancah internasional. Proses pengambilan keputusan luar negeri selalu didasari oleh kebutuhan dan kepentingan nasional yang tercermin di dalam kehendak masyarakat. Sehingga, secara umum konsep kebijakan luar negeri tidak jauh berbeda dengan kebijakan dalam negeri, hanya saja ruang lingkupnya meliputi aktor-aktor internasional dan intensitas persaingan kepentingan jauh lebih tinggi, lebih-lebih pada sesuatu yang berkaitan dengan isu ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Lebih lanjut, peneliti akan menjelaskan konsep kebijakan luar negeri dalam perspektif K.J. Holsti.

Kebijakan luar negeri, sebagaimana penjelasan K.J. Holsti, pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjalin hubungan dengan aktor-aktor atau negara-negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dalam politik dunia internasional demi mencapai tujuan nasionalnya.[24] Holsti juga mencirikan kebijakan luar negeri sebagai proses pembentukan keputusan atau pengulangan pola dan tindakan sebagai ciri khas perilaku dan sikap diplomatik sebuah negara.[25]

Ruang lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta memperhatikan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut.[26]

Secara fungsi, kebijakan luar negeri didefinisikan sebagai serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain di bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer; atau dalam tingkatan lain juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi non-negara. Interaksi tersebut dimonitor dan dievaluasi dalam usaha untuk memaksimalkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari kerjasama internasional.[27] Dengan demikian, aktor-aktor negara akan melakukan berbagai macam kerjasama, baik kerjasama yang bersifat bilateral, trilateral, regional, maupun multilateral, yang biasa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui perang, perdamaian dan kerjasama ekonomi.[28]

> ... Interaksi antar negara dalam sistem internasional sekarang ini bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian

[24] K.J. Holsti, *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* (University of British Columbia, 2012), 222.
[25] Ibid., 233.
[26] K.J. Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Terj. Wawan Juanda, (Bandung: Bina Cipta, 1992), 21.
[27] K.J. Holsti, *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, Op.Cit, 222.
[28] K.J. Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Op.Cit, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dari berbagai negara. Dari banyak kasus yang terjadi pemerintah saling berhubungan atau melakukan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagi bukti teknis untuk menolong permasalahan tertentu, dan mengadakan beberapa perjanjian yang memuaskan bagi semua pihak.[29]

Fungsi tersebut juga mencakup dalam konteks bantuan luar negeri sebagai instrumen hubungan internasional. Kajian tentang *foreign policy* bisa menjadi acuan untuk mengetahui cara pengambilan kebijakan di negara donatur terhadap negara penerima, dalam mempromosikan kepentingan nasionalnya di atas batas teritori negara. Konsep ini akan menjabarkan bagaimana perubahan dalam lingkungan eksternal dapat mempengaruhi negara yang bersangkutan, atau proses pembentukan "*image*" yang diinginkan negara tersebut dari lingkungan eksternalnya.[30]

Holsti menjelaskan, bahwa kebijakan luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Terdapat lima landasan pembuatan sumber kebijakan luar negeri, meliputi:[31]

1. Sumber Eksternal (*External Sources*), meliputi atribut-atribut yang ada pada sistem internasional dan pada karakteristik serta sikap suatu negara dalam menjalaninya. Sumber Eksternal mencakup perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal, kebijakan dan tindakan dari negara lain baik itu

[29] Ibid, 650.
[30] K.J. Holsti, *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*, Op.Cit, 222.
[31] Eugene R. Charles Wittkoff, dkk., *American Foreign policy*, Sixth Edition (United States: Thomson Wadsworth, 2003), 16-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konflik maupun kerjasama, ancaman, dukungan yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi *foreign policy* suatu negara.

2. Sumber Masyarakat (*Societal Sources*), yaitu seluruh karakteristik sosial domestik dan sistem politik yang membentuk orientasi masyarakat terhadap dunia. Intinya adalah seluruh aspek non-pemerintah dari sistem politik yang mempengaruhi *foreign policy*. Hal ini meliputi keadaan geografis, etnis, nilai atau norma yang berkembang di masyarakat, populasi, opini publik, dan lain- lain.
3. Sumber Pemerintah (*Governmental Sources*), meliputi seluruh elemen dari struktur pemerintahan yang memberikan pertimbangan-pertimbangan akan pilihan *foreign policy*, baik yang sifatnya memperluas atau membatasi pilihan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan, tentunya dalam lingkungan serta interaksi antar pihak-pihak di dalam pemerintahan.
4. Sumber Peranan (*Role Sources*), *role* di sini terkait dengan peranan atau status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan.
5. Sumber Individu (*Individual Sources*), meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang mempengaruhi persepsi, pilihan-pilihan dan respon atau reaksi dari seorang pengambil keputusan dari pengambil keputusan yang lain.

Maka, sesungguhnya keputusan dalam pengambilan kebijakan luar negeri tidak akan pernah lepas dari faktor internal suatu negara, meliputi aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi, politik dalam negeri, situasi sosial, kelompok kepentingan, dan lain-lain. Selain itu, faktor eksternal juga tetap menjadi pertimbangan dalam pengambilan sebuah kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam hal ini, pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain, selain mencakup unsur kekuasaan (*power*), kepentingan dan tindakan, juga mencakup perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Jadi politik internasional menggambarkan hubungan dua arah (reaksi dan respon) bukan aksi.[32] Dengan demikian, apa yang telah diupayakan sebagai kepentingan nasional akan dapat direalisasikan, dengan saling mengkondisikan antara faktor internal dan eksternal sesuai dengan kepentingan nasional.

Konsep tersebut mengacu pada pandangan Holsti, bahwa, *foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated*.[33] Maksudnya, kurang lebih, bahwa politik luar negeri sebagai suatu analisis keputusan negara terhadap keadaan lingkungan pada kondisi eksternal negara, dan biasanya melihat kondisi di dalam negeri terlebih dahulu untuk bertindak dan merumuskan kebijakan politik luar negeri suatu negara, menyesuaikan dengan kepentingan nasional.

K.J. Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara: *Pertama*, nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan; *Kedua*, jangka waktu yang dibutuhkan

[32] K.J. Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Op.Cit, 58.
[33] K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", 1970, Vol. 14, No. 3, 233-309. Diakses pada http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, meliputi tujuan jangka pendek (*short term*), jangka menengah (*middle term*), dan jangka panjang (*long term*); *Ketiga*, tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.[34]

Untuk mewujudkan kepentingan nasional, perumusan kebijakan luar negeri harus memenuhi semua kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Adapun kepentingan nasional itu sendiri, bertolak pada keniscayaan karakter ”negara” yang cenderung invasif. Sehingga, kepentingan nasional memiliki pengertian yang tidak jauh dari upaya untuk meningkatkan kekuatan domestik, sekaligus berusaha memperluas pengaruh keluar batas negaranya, melalui individu pembuat kebijaksanaan yang berkehendak membuat kondisi tertentu.[35] Output politik luar negeri dapat berupa kebijaksanaan, sikap, atau tindakan negara, yang merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh pembuat kebijaksanaan.

Beberapa variabel untuk menganalisis kebijakan luar negeri, di antaranya meliputi: 1) Atribut Nasional, yaitu meliputi kapabilitas yang kuat dan lemah, sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan komposisi etnis sosial; 2) Kondisi Eksternal, meliputi persepsi ancaman dan perubahan fundamental dalam kondisi eksternal; dan 3) Atribut Ideologi dan Sikap, yang mencakup kebijakan dan peranan tradisional, sikap dan pendapat

[34] K.J. Holsti dalam Bruce Russet dan Harvey Starr (1988) dalam Yanyan Mochamad Yani, “Politik Luar Negeri,” Makalah dalam ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007, 6.
[35] K.J. Holsti, *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Op.Cit, 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, tanggung jawab kemanusiaan, prinsip ideologi, identifikasi diri terhadap kawasan dan pertentangan ideologi dengan negara lain.[36]

Kebijakan luar negeri juga mengandung komponen tindakan, suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah sebuah negara kepada pemerintah negara lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran atau mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan, pada dasarnya, merupakan satu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk mengubah atau mendukung perilaku pemerintah negara lain yang sangat berperan untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan pemerintah negara yang bersangkutan.[37] Proses politik internasional dimulai bila sebuah negara berusaha melalui berbagai tindakan atau isyarat untuk mengubah atau mendukung perilaku negara lain, mulai dari tindakannya, citranya dan kebijakannya. Dengan demikian, kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan umum suatu negara untuk mengendalikan perilaku negara lain.[38]

Tindakan-tindakan politik luar negeri pada hakikatnya merupakan teknik-teknik yang digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam strategi kebijakan luar negeri. Tindakan tersebut dapat dibedakan berdasarkan teknik yang digunakannya. Menurut Holsti, tindakan kebijakan luar negeri dapat dibedakan menurut sarana yang digunakannya:[39]

Pertama, diplomasi. Upaya untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan nasional suatu negara, rasionalisasi kepentingan tersebut,

[36] Ibid, 463.
[37] Ibid, 186.
[38] Ibid, 159.
[39] Ibid, 130-192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ancaman, janji, dan kemungkinan kesepakatan-kesepakatan yang dapat diterima dalam suatu isu kepada pemerintah negara lain. Diplomasi pada hakikatnya merupakan proses negosiasi, di mana masing-masing negara melakukan tawar-menawar dalam suatu isu tertentu demi mencapai kepentingan nasionalnya melalui saluran-saluran resmi yang telah disepakati.

Kedua, propaganda. Upaya untuk mempengaruhi perilaku dan opini publik asing, sehingga sesuai dengan kehendak negara yang melakukan propaganda. Publik asing meliputi negara lain, kelompok etnik, kelompok religi, atau kelompok ekonomi tertentu dengan harapan bahwa publik ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan kebijakan pemerintahnya sesuai dengan harapan negara yang melancarkan propaganda.

Ketiga, ekonomi. Upaya untuk memanipulasi transaksi ekonomi internasional demi mencapai tujuan-tujuan nasional. Bentuknya dapat berupa imbalan (*rewards*) maupun paksaan (*coercion*). Sebagai sarana paksaan, ransaksi ekonomi internasional digunakan untuk memaksa pemerintah asing mengubah kebijakan-kebijakannya, baik domestik maupun luar negeri agar sesuai dengan keinginan pemerintah yang melancarkan ancaman tersebut. Sedangkan sebagai sarana imbalan, transaksi ekonomi internasional digunakan untuk mendukung agar pemerintah asing terus melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan pemerintah si pemberi imbalan.

Keempat, militer. Upaya untuk mempengaruhi perilaku dan kebijakan negara lain dengan menggunakan ancaman dan/atau dukungan militer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep yang dikemukakan oleh Holstu mengenai kebijakan luar negeri sejalan dengan pandangan William D. Coplin mengenai penetapan politik luar negeri oleh pengambil kebijakan di suatu negara yang pada dasarnya dipengaruhi oleh empat determinan, meliputi: konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, politik dalam negeri, dan perilaku pengambil kebijakan.[40] Konteks internasional menurut Coplin—hampir sama dengan faktor eksternal menurut Holsti—bahwa posisi khusus negara dipengaruhi oleh situasi global yang sedang terjadi, atau bergantung pada hubungannya dengan negara lain.[41] Sedangkan kondisi ekonomi dan militer serta politik domestik merupakan faktor internal yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan luar negeri, termasuk di dalamnya adalah pertimbangan kepentingan nasional. Meskipun, kadang pula, pengambil keputusan juga memengaruhi kebijakan luar negeri dari aspek personalitasnya.

B. Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

Indonesia menganut politik luar negeri yang mempunyai sifat bebas-aktif. “Bebas” artinya tidak terikat oleh salah satu blok, dan “aktif” diartikan sebagai giat atau aktif dalam mengembangkan perdamaian, persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Moh. Hatta menyatakan, bahwa politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif bukan berarti netral, karena politik yang netral tidak membangun perdamaian dunia. Bebas-aktif di sini, selain Indonesia berada dalam posisi bebas untuk tidak

[40] William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 165.
[41] Ibid, 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memihak salah satu blok, tetapi di pihak lain Indonesia akan aktif untuk ikut mengusahakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Dengan demikian, Indonesia tidak cenderung ke salah satu blok.[42]

1. Tinjauan Historis

Asas politik luar negeri Indonesia, secara resmi, baru dimulai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Moh. Hatta, selaku Perdana Menteri Indonesia, di depan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) di Yogyakarta pada 2 September 1948.[43] Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Moh. Hatta adalah orang pertama yang meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Indonesia.[44] Dasar-dasar politik luar negeri ini, dikemukakan dalam pidatonya yang berjudul *Mendayung di Antara Dua Karang*.

Moh. Hatta, sebagaimana dalam pidatonya, mempertahankan rumusan bebas-aktif untuk tidak memihak salah satu blok dan di lain pihak ikut aktif mewujudkan perdamaian dunia. Menarik untuk diketahui bahwa formula ini pada awalnya dipilih untuk menolak tuntutan sayap kiri pada masa itu yang menginginkan agar Indonesia berpihak kepada Uni Soviet dan sekaligus menolak tuduhan Belanda, serta pada saat yang sama untuk menjaga jarak dari pengaruh Amerika Serikat yang secara intensif

[42] Ide Anak Agung Gde Agung, *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965* (Paris: Mouton-The Hague), 178.
[43] J. Soedjati Djiwandono, "Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia: Perubahan dan Kesinambungan", *Analisa*, 1985, No. 8, 645.
[44] Mochtar Kusumaatmadja, "*Bung Hatta Peletak Dasar Politik Luar Negeri Kita" dalam Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat* (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Dalam kesempatan itu Hatta mengatakan:

> Tetapi, mestikah kita, bangsa Indonesia, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara, hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika? Apakah tak ada pendirian yang lain, yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita? Pemerintah berpendapat, bahwa pendirian yang harus kita ambil adalah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik internasional, melainkan harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya.[45]

Uraian ini merupakan deklarasi ketidak berpihakan untuk menjadikan Indonesia lebih berarti sebagai subyek dan bukan hanya obyek belaka. Sikap politik Indonesia akan ditentukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Istilah "bebas-aktif" bukan berarti politik netral. Sebab, netral tidak berusaha membangun perdamaian dunia. Istilah "bebas-aktif" yang dimaksudkan adalah, selain tidak memihak salah satu blok, juga bertekad ikut berusaha mewujudkan perdamaian dunia.

Pidato tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam artikel berjudul *Indonesia Foreign Policy* dan *Indonesia Between the Power Block* yang dimuat dalam majalah Foreign Affairs tahun 1953 dan 1958. Menurutnya, perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, bukan lantas untuk memilih Amerika Serikat atau Uni Soviet. Pemerintah Indonesia tidak mengambil posisi sebagai anggota yang pasif (*a passive party*) dalam politik dunia internasional, melainkan sebagai anggota dunia yang aktif. Politik luar negeri Indonesia harus diletakkan di atas kepentingan nasional

[45] Mohammad Hatta, *Mendayung di Antara Dua Karang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan disesuaikan dengan situasi dan kenyataan yang ada, dan garis politiknya tidak boleh ditentukan oleh garis politik negara lain.[46] Hatta juga menjabarkan rumusan bebas-aktif secara lebih jelas:

> Indonesia tidak memainkan sikap keberpihakan di antara kedua blok yang bertentangan, dan menempuh jalannya sendiri dalam berbagai masalah internasional. Kebijaksanaan seperti ini disebut dengan istilah "bebas", dan kemudian untuk menandainya digambarkan sebagai bebas dan aktif. Istilah "aktif" dimaksudkan sebagai upaya bekerja secara penuh semangat bagi pemeliharaan perdamaian melalui dukungan kuat, jika mungkin oleh mayoritas anggota PBB.[47]

Konsep kebijakan luar negeri yang bebas-aktif ini juga merupakan suatu cara untuk mempertahanan prioritas-prioritas dalam negeri. Franklin B. Weinstein menyatakan, bahwa prinsip bebas-aktif dianggap oleh banyak pemimpin Indonesia sebagai sesuatu yang esensial untuk memelihara harga diri, identitas nasional dan *image* Indonesia. Sebanyak 61% dari para pemimpin Indonesia, menginginkan agar Indonesia dapat memainkan peranan penting dalam percaturan politik dunia dan mampu berperan dalam percaturan politik dunia, khususnya di Asia Tenggara.[48]

2. Kerangka Filosofis

Secara idiil, politik luar negeri bebas-aktif dilandasi Pancasila. Sebagai falsafah dan dasar negara, Pancasila lahir, selain untuk menuntun kehidupan bangsa dan negara Indonesia, juga merupakan abstraksi bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Hatta menyebutnya sebagai

---

[46] Ide Anak Agung Gde Agung. *Op. Cit*, 44.
[47] Michael Leifer, *Indonesia's Foreign Policy*, Penerj. A. Ramlan Surbakti, *Politik Luar Negeri Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1989), 42.
[48] Redaksi Prisma, "Politik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan dari Sukarno sampai Suharto", *Prisma*, 1977, No. 9 Tahun VI, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu faktor yang membentuk politik luar negeri Indonesia (*objektif Influence*). Baginya, Pancasila bisa menciptakan keteraturan (*order*) dalam *foreign policy*.[49] Oleh karena itu, secara filosofis, prinsip politik luar negeri bebas-aktif menjadi salah satu jalan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang telah disarikan dalam Pancasila.

Sila pertama, secara implisit menjelaskan, bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Setiap manusia berkedudukan sederajat, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Sikap ini, tidak hanya mendasari kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi pandangan politik Indonesia dalam kehidupan internasional.

Sila kedua, menunjukkan bahwa Indonesia tidak menghendaki adanya penindasan dalam bentuk apapun, baik manusia atas manusia (*explotation de l'homme par l'homme*), maupun penindasan negara atas negara (*explotation de nation par nation*).

Sila ketiga, terlihat bahwa Indonesia menempatkan persatuan di atas segalanya, dan kepentingan nasional berada di atas kepentingan pribadi. Implementasinya dalam hubungan internasional, Indonesia menganggap bahwa setiap negara merupakan unit tersendiri yang mandiri dan bukan merupakan sub-unit dari negara lain.

Sila keempat, mencerminkan bahwa dalam membuat keputusan maupun dalam menyelesaikan masalah, harus melalui proses musyawarah-mufakat. Begitu pula dalam organisasi internasional, memutuskan sesuatu

[49] Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau dalam penyelesaian masalah global, semestinya dilakukan melalui musyawarah-mufakat.

Sila kelima, menunjukkan bahwa Indonesia menyadari hak dan kewajiban sesama, sehingga menciptakan keadilan menjadi penting dalam kehidupan sosial. Tanggung jawab untuk menciptakan keadilan, selanjutnya dihayati pula dalam tata pergaulan Indonesia dengan dunia internasional. Sikap tersebut dalam rangka ikut mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa di dunia, termasuk dalam membantu negara-negara yang sedang krisis.

3. Landasan Yuridis

Sedangkan secara yuridis, konsep tentang politik bebas-aktif merupakan cerminan dari UUD 1945. Tampak jelas, pada periode awal setelah merdeka, konsep ini adalah pengejawantahan dari sikap politik Indonesia yang enggan menggantungkan nasib negara dan bangsa kepada kekuasaan dan pengaruh negara luar, sebagaimana kolonialisme yang sebelumnya berjalan ratusan tahun dan telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada alenia I dan IV pembukaan UUD 1945 serta dalam pasal 11 dan 13 batang tubuh, dengan penjabaran sebagaimana berikut:

Pertama, alenia I pembukaan UUD 1945 menyatakan, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan."[50] Setiap negara di dunia berhak untuk merdeka dan mengatur pemerintahannya sendiri. Untuk itu, Indonesia akan membantu setiap usaha untuk mencapai kemerdekaan negara-negara lain. Seperti dalam rumusan yang disepakati oleh anggota Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, terminologi "penjajahan" mencakup kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk apapun.

Kedua, alenia IV pembukaan UUD 1945 menyatakan, "bahwa negara Indonesia akan membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."[51] Alenia ini merupakan tujuan jangka panjang dari politik luar negeri Indonesia, serta memperjelas sikap Indonesia dalam membantu mewujudkan tata kehidupan di dunia yang lebih baik, lebih tertib dan lebih sejahtera.

Ketiga, pasal 11 UUD 1945, memuat hak Presiden berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memutuskan sikap: menyatakan perang, membuat perdamaian, atau perjanjian negara.

Keempat, Pasal 13 UUD 1945, terdiri dari dua ayat yang meliputi: 1) Presiden mengangkat duta dan konsul; dan 2) Presiden menerima duta negara lain.[52]

4. Dasar Hukum

[50] Lihat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
[51] Ibid.
[52] Undang-Undang Dasar 1945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara operasional, ada tiga hal yang merupakan landasan politik luar negeri Indonesia. *Pertama*, ketetapan MPR dalam hal ini Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bidang hubungan luar negeri, yang berlaku untuk kurun waktu lima tahun. *Kedua*, kebijaksanaan yang dibuat oleh Presiden (Keppres), melalui permusyawaratan dan pertimbangan bersama kementerian maupun lembaga terkait, mengenai kebijaksanaan luar negeri. *Ketiga*, kebijaksanaan yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri, berdasarkan petunjuk Presiden. Dari tiga landasan operasional politik luar negeri bebas-aktif tersebut, berikut beberapa di antaranya:

a. Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960

Pada 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menyampaikan pidato dengan judul *Penemuan Kembali Revolusi Kita*, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip utama dari Demokrasi Terpimpin, serta program jangka panjang dan jangka pendek kabinet yang akan membawa kepada jiwa dan cita-cita revolusi Indonesia. Pidato tersebut selanjutnya menjadi landasan politik yang dikenal dengan istilah Manifesto Politik (Manipol), kemudian ditetapkan sebagai GBHN dengan Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960, melalui persetujuan Presiden Soekarno.[53]

Di dalam Manipol, secara umum termuat dua hal, yaitu persoalan-persoalan pokok revolusi Indonesia dan program umum

[53] Persetujuan Presiden Soekarno disampaikan dalam pidatonya, berbunyi: "... selaku Kepala Negara, Panglima Tertinggi dan Perdana Menteri, menyetujui sepenuhnya pendapat Dewan Pertimbangan Agung tersebut; juga perincian isi pidato tersebut ... yang juga dinamakan Manipol RI ..." Departemen Penerangan RI, *Manifesto Politik Republik Indonesia* (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1959), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revolusi Indonesia. Termasuk di dalamnya, pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri. Berkaitan dengan kewajiban revolusi, Indonesia harus membebaskan diri dari semua imperialisme, dan menegakkan tiga sendi kerangka revolusi, meliputi:

Pertama, pembentukan suatu negara, Republik Indonesia, yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis dengan wilayah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke. *Kedua*, pembentukan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik secara materiil maupun sprituil, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, pembentukan suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara Asia-Afrika, atas dasar saling menghormati satu sama lain dan atas dasar kerjasama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia.[54]

Adapun tujuan jangka pendeknya, sebagaimana dalam Manipol, adalah mencukupi sandang, pangan, keamanan dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme serta mempertahankan kepribadian Indonesia di tengah-tengah tarikan ke kanan dan ke kiri. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia yang kekal abadi.[55]

b. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966

[54] Ibid., 13.
[55] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memasuki era Orde Baru, Indonesia berangkat dengan semangat untuk memurnikan politik luar negeri dari penyelewengan yang terjadi pada masa Orde Lama. Bagi pemerintahan Orde Baru, politik luar negeri Indonesia di era Orde Lama dengan sistem Demokrasi Terpimpinnya, pada nyatanya menitik beratkan sikap dan kedekatannya kepada salah satu blok, dalam hal ini Republik Rakyat China (RRC), dan membentuk poros kesetia kawanan dengan negara-negara komunis, atau yang dikenal dengan istilah poros Jakarta-Peking-Pyongyang.

Didorong oleh keinginan untuk menempatkan politik luar negeri bebas-aktif sesuai pada tempatnya, pemerintah Orde Baru melalui sidang istimewa mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Penegasan Kembali Politik Luar Negeri Indonesia. Ketetapan ini, hanya merupakan penegasan kembali, dari apa yang dianggap menyeleweng dalam pola pelaksanaannya. Dalam ketetapan terbut disebutkan, antara lain, bahwa sifat politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif, anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang semua itu tidak lain adalah untuk mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

Terlepas dari beberapa komponen yang melandasi politik luar negeri bebas-aktif ini, pada kenyataannya terjadi perumusan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penafsiran yang berbeda antara aktor politik (pemerintah) yang satu dengan lainnya, berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi, meskipun pada dasarnya prinsip yang dipakai tetaplah sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEBIJAKAN MERESPON ISU ROHINGYA

Pada bab ini, peneliti akan mendeskripsikan perolehan data yang didapat melalui sumber primer dan sekunder, meliputi: struktur, tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia; dilanjutkan dengan latar belakang kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Rohingya; kemudian mulai menyentuh pada rumusan-rumusan kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo yang disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Rumusan tersebut juga meliputi alur penyusunan kebijakan luar negeri, mulai dari artikulasi kepentingan, analisis faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menjadi ancaman, sampai perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Di samping itu, masih ada proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan tujuan dan target yang telah ditentukan.

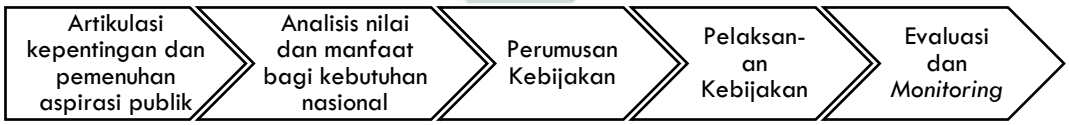

Bagan: Sketsa Alur Perumusan Kebijakan Luar Negeri (Diolah dari situs www.kemlu.go.id)

Selanjutnya, kepentingan nasional Indonesia maupun regional ASEAN sebagai pertimbangan dirumuskannya kebijakan luar negeri terhadap isu Rohingya juga penting untuk diulas pada bab ini. Terakhir, peneliti akan menampilkan kebijakan luar negeri Indonesia, baik meliputi bentuk, sikap maupun diplomasinya dalam merespon krisis kemanusiaan di Myanmar, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan disertai dengan analisis terhadap keseluruhan data-data yang telah dideskripsikan pada akhir bab.

A. Struktur, Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri RI

Dalam urusan luar negeri, pemerintah Indonesia memberikan tugas dan wewenangnya kepada lembaga khusus, dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri. Lembaga ini, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[56]

Selanjutnya, secara lebih rinci, peraturan mengenai struktur dan wewenang Kementerian Luar Negeri Indonesia diatur dalam Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam peraturan tersebut, misalnya, dijelaskan fungsi Kementerian Luar Negeri Indonesia,[57] yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;

[56] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.
[57] Peraturan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia;
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
7. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;
8. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan
9. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagan: Struktur Kementerian Luar Negeri[58]

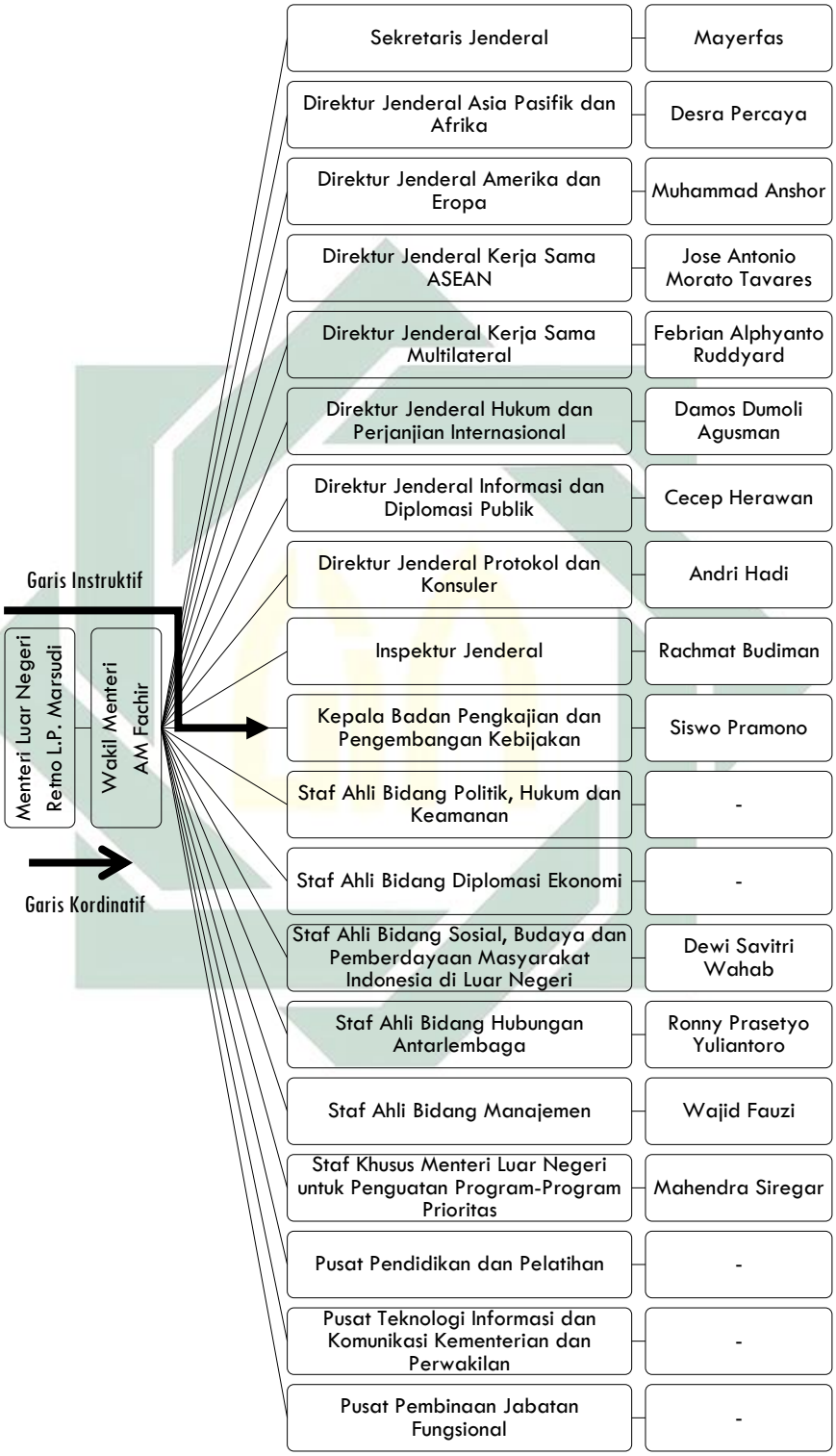

[58] Diolah dari situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses pada 7 Desember 2018, https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Default.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara historis, tugas Kementerian Luar Negeri dari masa ke masa terus berkembang. Di awal-awal kemerdekaan, tugas utamanya adalah berdiplomasi untuk mengusahakan menarik simpati dan dukungan masyarakat internasional, menggalang solidaritas negara sahabat di segala bidang, mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh dukungan dan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, hingga melakukan perundingan dan membuat persetujuan.[59]

Kemudian pada kisaran tahun 1966-1998, tugas diplomasi Kementerian Luar Negeri dilakukan untuk mengupayakan pengakuan Irian Barat, pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan dalam perjuangan hukum laut *United Nation Convention on Law of the Sea* (UNCLOS), meningkatkan kerjasama ASEAN, mencari pengakuan internasional terhadap Timor Timur, dan menjadi ketua gerakan non-blok untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang serta ketua APEC dan G-15, dan meningkatkan kerjasama pembangunan.[60]

Sedangkan sejak tahun 1998 sampai sekarang, tugas utama Kementerian Luar Negeri mulai diarahkan untuk memagari potensi disintegrasi bangsa, membantu pemulihan ekonomi, mengupayakan peningkatan citra Indonesia, dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI.[61]

---

[59] Perkembangan Kementerian Luar Negeri, diakses pada 7 Desember 2018, https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/sejarah/Pages/Perkembangan-Kementerian-Luar-Negeri.aspx.
[60] Ibid.
[61] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam merespon isu Rohingya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai kebijakan luar negeri, yang secara organisasi, dilakukan oleh Direktorat Asia Tenggara yang berada di bawah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. Direktorat Asia Tenggara, yang dipimpin oleh Denny Abdi sebagai Direktur dan Dewi Lestari sebagai Wakil Direktur, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di kawasan Asia Tenggara.[62]

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Asia Tenggara dibantu oleh 4 Subdirektorat, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan isu Rohingya masuk dalam wilayah Subdirektorat IV yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dengan Vietnam, Kamboja dan Myanmar, serta fungsi meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan; penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan; penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan; penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam kerangka kebijakan; dan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan luar negeri.[63]

B. Riwayat Kebijakan Luar Negeri Indonesia Era Jokowi terhadap Isu Kemanusiaan dan HAM

[62] Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.
[63] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama hampir lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan sangat kolaboratif. Tidak saja fokus pada isu-isu ekonomi, Indonesia juga aktif dalam merespon isu HAM. Beberapa fakta mengenai keterlibatan aktif Indonesia di dalam isu HAM antaranya adalah dalam upaya perdamaian Palestina: yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel; mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil *voting* terhadap Israel; menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan *OIC Extraordinary Summit* di Istanbul; membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan.

Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan, terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pada pertemuan trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia itu pula, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik *Indonesia Islamic Center*.

Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian. Tercatat sebanyak 2.695 *peacekeeper* yang merupakan personel gabungan TNI-Polri yang bertugas pada 9 misi perdamaian dunia, sehingga menjadikan Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik.[64]

Selain itu, Indonesia juga aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan ke daerah konflik di Asia dan Timur Tengah, misalnya Cox Bazaar dan Rakhine State, Myanmar; Jalur Gaza, Palestina-Israel; dan Marawi, Filipina. Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara: melanjutkan dialog lintas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral; mengembangkan dan membangun pemahaman Islam Wassatiyyat kepada dunia melalui *High Level Consultation of World Moslem Scholars on Wassatiyyat* di Indonesia pada Mei 2018. Pertemuan ini melahirkan *Bogor Ulama Declaration for Peace*; selanjutnya mengembangkan *Bali Democracy Forum* sebagai sarana strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia.[65]

Yang tak kalah penting adalah terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara Anggota PBB memercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang lebih diplomatis.

---

[64] Febian Januarius Kuwado, "Politik Luar Negeri Jokowi-JK dalam 4 Tahun, Apa Saja Pencapaiannya?", *Kompas*, diakses pada 18 Desember 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya?page=all.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai macam keterlibatan Indonesia di dalam isu HAM, ada kaitannya dengan kehendak masyarakat Indonesia sebagai mayoritas muslim untuk terlibat dalam upaya penyelesaian konflik di beberapa negara dengan mayoritas muslim. Mulai dari isu Palestina, Pakistan sampai Rohingya, keterlibatan Indonesia tidak lepas dari tingginya animo masyarakat dalam memberikan simpati terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Sebagaimana yang diungkapkan Dewi Lestari, bahwa:

> *National interest* ini tidak hanya terwujud dalam aksi demonstrasi, tapi juga kerelaan masyarakat memberikan bantuan. Bahkan untuk bantuan yang dikumpulkan oleh NGO nilainya sangat besar.[66]

Kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan di Palestina, Timur Tengah dan Myanmar merupakan kepedulian yang muncul dari rasa solidaritas sesama muslim masyarakat Indonesia. Hal inilah yang menjadi faktor internal dalam aktifitas politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Jokowi.

Pada kasus Rohingya, misalnya, dengan fakta Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, maka menjadi wajar apabila sebagian besar masyarakat Indonesia merasa simpati atas apa yang menimpa etnis muslim Rohingya. Rasa simpati tersebut kemudian diartikulasikan dengan melaksanakan berbagai aksi solidaritas di hampir seluruh daerah di Indonesia, dan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang hampir sama, yakni

[66] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meminta pemerintah Indonesia agar segera mengambil langkah efektif untuk menyelesaikan konflik tersebut dan melindungi etnis muslim Rohingya.[67]

Selain faktor *national interest*, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu HAM juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti pada krisis kemanusiaan di Myanmar, Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN merasa perlu untuk segera menyelesaikan konflik dan krisis di Myanmar. Sebab, masyarakat internasional memandang ASEAN sebagai organisasi regional tidak sepenuhnya peduli dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan masalah Rohingya secara maksimal, sehingga terkesan membiarkan krisis tersebut terus berlangsung.

> Jadi kritik selama ini terhadap ASEAN *including* Indonesia adalah, mengapa ASEAN terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut? Dunia internasional itu menganggap seakan-akan ASEAN itu tidak sepenuhnya peduli, atau tidak melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan masalah ini.[68]

Padahal, dalam sejarahnya, ASEAN dibentuk untuk membangun ikatan solidaritas antar sesama negara Asia Tenggara. Sebagaimana sejak terbentuknya ASEAN, tidak pernah ada lagi perang, mulai dari perang Vietnam, perseteruan Thailand dengan Laos tahun 1986, invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1978, sampai konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Selain itu, itu ASEAN juga mampu menciptakan situasi yang relatif stabil dan mampu mengelola komunikasi antar negara Asia Tenggara. Sehingga krisis Rohingya menjadi semacam ujian bagi ASEAN, khususnya

---

[67] Novandre Satria & Ahmad Jamaan, "Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine Myanmar," *Jurnal Transnasional*, Juli 2013, Vol. 5 No. 1, hlm. 957.

[68] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagai salah satu anggotanya, untuk dapat mengembalikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara.

C. Sejarah Konflik Rohingya

Persoalan Rohingya pada mulanya berawal dari kudeta militer di Myanmar pada 1962, yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Pasca kudeta itu, banyak program pemerintah sebelumnya berkaitan dengan Rohingya dihapus oleh pemerintahan junta militer. Sehingga akhirnya mengecewakan warga Rohingya, sekaligus menjadi latar belakang munculnya berbagai macam kelompok gerakan separatis, mulai dari *Rohingya Independence Force* (RIF), *Rohingya Independence Army* (RIA), *Rohingya Patriotic Front* (RPF), sampai *Rohingya National Alliance* (RNA) yang bertujuan menuntut pembentukan daerah otonom bagi Muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma.[69]

Merespon hal tersebut, pemerintah junta militer tidak tinggal diam, dan segera menggelar operasi militer bernama Naga Min. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa kartu identitas penduduk. Semua yang tercatat sebagai Rohingya diusir. Terjadi pula pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya, yang mendorong 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Tak lama setelah operasi Naga Min, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Dalam undang-undang tersebut termaktub bahwa pemerintah hanya mengakui 135 kelompok warga negara yang disebut "*national race*" dan Rohingya tak termasuk di dalamnya.[70]

---

[69] Fajar Budi, "Rohingya yang Kian Tersingkir," *Historia*, diakses pada 9 Desember 2018, https://historia.id/mondial/articles/rohingya-yang-kian-tersingkir-vqr50.
[70] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kenyataan di atas, dapat diidentifikasi, bahwa sebenarnya persoalan di Myanmar adalah masalah domestik Myanmar. Persoalan yang juga pernah dihadapi Indonesia dalam menghadapi gerakan separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Akan tetapi, konflik kian menjadi dan mengakibatkan jatuhnya ribuan nyawa dan terbengkalainya pengungsi Rohingya di tengah lautan. Dengan demikian, isu Rohingya berkembang menjadi isu krisis kemanusiaan yang mengundang perhatian masyarakat internasional.

Isu krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian organisasi internasioanl, khususnya PBB. Selain itu, pada saat yang sama Indonesia juga telah berkomitmen untuk ikut berperan aktif di dalam menyelesaikan konflik dan krisis kemanusiaan, lebih-lebih di negara kawasan Asia Tenggara dan tergabung dalam keanggotaan ASEAN.

Terhadap isu Rohingya, intensitas pemerintah Indonesia dalam merespon isu Rohingya adalah sejak memuncaknya konflik di Rakhine State pada tahun 2012. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Dewi Lestari, bahwa "kita (Indonesia) sebenarnya telah aktif di Myanmar itu sejak 2012."[71]

D. Kepentingan Nasional Indonesia dan ASEAN

Krisis yang sedang dan terus terjadi di Myanmar, pada nyatanya telah mengakibatkan perpecahan yang timbul dari perbedaan sikap negara-negara ASEAN terhadap isu Rohingya menjadi tiga poros.

[71] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Ada yang sangat keras membela berdasarkan solidaritas Islam, yaitu Malaysia; ada yang mencoba menengahi secara konstruktif, Indonesia; ... dan ada yang tenang-tenang saja memang, artinya tidak mau ikut campur karena menganggap ASEAN ini memiliki prinsip non-intervensi, ... contoh Kamboja dan Thailand.[72]

Berdasarkan Piagam ASEAN (*The ASEAN Charter*), salah satu tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.[73] Dalam hal ini, pokok-pokok pikiran pendirian ASEAN menghendaki ASEAN untuk terlibat dalam penyelesaian krisis Rohingya. Meskipun pada piagam tersebut juga memiliki prinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN,[74] ASEAN tetap mempunyai kewajiban untuk ikut serta menyelesaikan krisis di Myanmar berdasarkan prinsip komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan.[75]

Pemerintah Indonesia dalam menerjemahkan tujuan dan prinsip Piagam ASEAN, kaitannya untuk merespon krisis Rohingya, adalah dengan tidak memaksakan diri atas kepedulian dan bantuan yang akan diberikan terhadap Myanmar, dan menghindari upaya-upaya intervensi terhadap Myanmar serta tetap menghormati kedaulatan negara Myanmar.

---

[72] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

[73] *To maintain and enhance peace, security and stabilityand further strengthen peace -riented values in the region*, The ASEAN Charter, Chapter I, Article 1, point 1.

[74] *Respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity of all ASEAN Member State*, The ASEAN Charter, Chapter I, Article 2, point 2 (a).

[75] *Shared commitment and collective responsibility in enhancing regional peace, security and prosperity*, The ASEAN Charter, Chapter I, Article 2, point 2 (b).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Indonesia dalam menyelesaikan krisis Rohingya adalah dalam konteks *shared commitment and collective responsibility*. Artinya, ada tanggungjawab kolektif sebagai sesama negara ASEAN, ketika sebuah negara ASEAN menghadapi masalah kemudian tidak mampu melindungi rakyatnya, kita bersama-sama punya tanggung jawab kolektif. Tidak bisa kita hanya tinggal diam, ada *moral obligation* untuk ikut menyelesaikannya.[76]

Berlangsungnya konflik hingga krisis di Myanmar secara berkepanjangan akan mempengaruhi pembangunan di Asia Tenggara. Termasuk akan mengganggu program ASEAN Community, yang meliputi aspek ekonomi, politik dan keamanan, dan sosio-budaya. Sehingga stabilitas politik dan keamanan di Myanmar sangat menentukan aktifitas ekonomi dan politik di negara-negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Ancaman yang akan dihadapi pun tak kalah mengerikan, mulai dari *human trafficking*, terorisme, dan perdagangan narkotika, dan potensi terjadinya *civil war*.

Dalam konteks bilateral, krisis Rohingya juga berpotensi mengganggu stabilitas dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Myanmar. Hingga kini, hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Myanmar masih berlangsung cukup baik. Banyak program yang terus berjalan, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Akan tetapi, jika konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar tak kunjung selesai, serta situasi politik keamanan belum juga stabil, maka bisa saja akan mengancam pada stabilitas hubungan dan kerjasama antar keduanya.

Selain itu, dan tak kalah penting, adalah persoalan pengungsi. Indonesia dan beberapa negara kawasan, dalam memandang krisis Rohingya

[76] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dalam konteks kepedulian terhadap sesama manusia. Sehingga, ketidakpastian nasib pengungsi Rohingya menjadi keresahan pemerintah Indonesia juga negara-negara kawasan yang secara geografis berdekatan dengan Myanmar. Di sisi lain, tentu Indonesia dan negara-negara kawasan yang berbatasan langsung dengan Myanmar akan memproteksi negaranya, khususnya di wilayah perbatasan, agar terhindar dari bahaya yang ditimbulkan dari terbengkalainya pengungsi, seperti perdagangan manusia dan sebagainya.

Pada akhirnya, sebuah kebijakan luar negeri akan diambil setelah mempertimbangkan beberapa aspek di atas. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya adalah dengan berperan aktif di dalam membantu proses penyelesaian konflik di Myanmar, serta mengembalikan stabilitas keamanan di Myanmar dan Asia Tenggara secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA BEBAS-AKTIF DALAM MERESPON ISU ROHINGYA

Pada bab ini, peneliti mencoba menguraikan kebijakan luar negeri yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya dengan menggunakan peta konsep kebijakan luar negeri K.J. Holsti. Peta konsep tersebut menjadi penting untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perumusan sebuah kebijakan luar negeri, baik secara internal maupun eksternal.

Tak cukup sampai di situ, analisis juga akan menelusuri pemaknaan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi terhadap prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Merunut penjelasan Dewi Lestari, bahwa "politik bebas-aktif masih sangat relevan bagi politik luar negeri Indonesia,"[77] khususnya berkaitan dengan sikap Indonesia dalam merespon isu Rohingya. Hal demikian dilakukan untuk menemukan posisi Indonesia di tengah multipersepsi dunia internasional, khususnya negara-negara *the big power*, terhadap gejolak yang terjadi di Myanmar.

Dua langkah tersebut akan diuraikan dalam dua sub-bab yang berdiri sendiri namun berkaitan satu sama lain, sehingga pada tahap selanjutnya dapat menjawab beberapa pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada dua bab sebelumnya, sekaligus menjadi hasil dan temuan pada penelitian ini.

[77] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Isu Rohingya

Perhatian utama Indonesia dalam membantu Myanmar menyelesaikan krisis adalah persoalan nasib pengungsi yang hingga kini jumlahnya telah mendekati 1 juta orang, serta kesediaan pangan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, kemudian resiko penyebaran penyakit, ancaman kejahatan dan pelecehan. Persoalan-persoalan tersebut yang direkomendasikan Indonesia untuk menjadi prioritas dalam penyelesaian, yakni dengan repatriasi pengungsi serta kepastian keamanan dan terpenuhinya hak-hak dasarnya.

Sebenarnya pada November 2017, Myanmar telah melakukan kesepakatan (*Memorandum of Understanding, MoU*) bersama Bangladesh untuk memulangkan pengungsi. Bahkan di waktu yang lain, MoU dilakukan juga bersama Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (*United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR*) dan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme, UNDP*) untuk membantu proses repatriasi. Namun, hingga hari proses repatriasi ini belum juga terlaksana akibat ketidakpercayaan para pengungsi Rohingya terhadap resolusi pemerintah Myanmar memulangkan pengungsi.

> Mereka (pengungsi Rohingya) tidak percaya. Gimana dia mau percaya, orang yang ngejar-ngejar mereka dulu ini militernya Myanmar, yang dituduh mengejar kan? Gimana mau percaya gitu saja, ya kan? Akhirnya kita bilang ke Myanmar, kalau gitu masalahnya adalah kredibilitas. Kalian harus dibantu untuk mengangkat lagi kredibilitas ... dengan cara membolehkan ASEAN masuk dan melibatkannya sebagai *observer* ... sehingga pengungsi ini dan dunia internasional yang melihat di situ percaya bahwa memang aman kembali pulang. Itulah ide Indonesia untuk masalah ini bisa selesai.[78]

[78] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, ide yang disampaikan Indonesia tersebut masih disikapi secara ragu-ragu. Pemerintah Myanmar masih enggan atas keterlibatan ASEAN, mengingat beberapa anggota ASEAN merupakan negara Islam atau berpenduduk mayoritas Islam. Myanmar takut ketika proses repatriasi melibatkan ASEAN (termasuk di dalamnya negara mayoritas Islam) dianggap sebagai intervensi oleh kelompok Buddhis Myanmar. Padahal kepedulian Indonesia lebih didasari oleh pertimbangan kemanusiaan, bukan agama.[79]

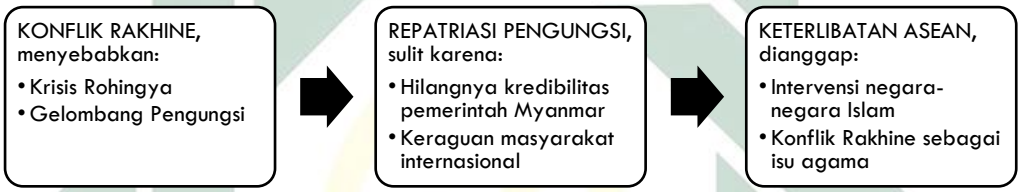

Bagan: Dinamika Konflik di Myanmar

Secara kolektif, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengenai krisis Rohingnya adalah: 1) Melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan; 2) Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan; 3) Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk shelter, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga negara; 4) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement*; 5) Mengaktifkan

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya milik ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) untuk menyelesaikan krisis ini.[80]

Di luar itu, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi telah mengambil berbagai upaya penting untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar, meliputi: *Pertama*, pada tahun 2017, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengajukan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State. Empat elemen ini terdiri dari: 1) mengembalikan stabilitas dan keamanan; 2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; 3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; dan 4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Sedangkan satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.[81]

Kedua, penyaluran bantuan (*emergency relief*) kepada pengungsi, baik yang berada di Myanmar maupun yang sudah berada di Bangladesh, berupa bantuan logistik, kebutuhan sandang, dan kebutuhan dasar lainnya.

> Kita sebetulnya aktif di Myanmar itu sejak 2012 ketika masih konflik komunal. Waktu itu kita sudah melakukan pembangunan sekolah ada 6 sekolah yang sudah dibangun di sana. Lalu sekarang kita sedang membangun rumah sakit di Rakhine State. Dan itu kita selalu tekankan inklusif untuk seluruh komunitas. Jadi tidak hanya untuk masyarakat

[80] Tim Redaksi, "Rohingya: antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan", *Masyarakat ASEAN*, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Edisi 8 / Juni 2015, hlm. 11.

[81] "Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar," *Kementerian Luar Negeri RI*, diakses pada 11 Desember 2018, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> muslim Rohingya, tetapi juga masyarakat komunitas Buddhis yang ada di sana, baik di itu (Rakhine State) maupun Cox Bazar.[82]

Ketiga, peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)—yang kini menjadi Indonesian Humanitarian Assistance (IHA)—pada 31 Agustus 2017. Peluncuran ini merupakan wujud dari kerjasama pemerintah Indonesia dengan non-government organization (NGO) untuk bersama-sama membantu menyelesaikan konflik di Myanmar. Aliansi tersebut terdiri dari 11 organisasi kemanusiaan, yang memprioritaskan bantuannya pada empat hal, yaitu pendidikan, kesehatan, *livelihood* (ekonomi), dan relief. Komitmen bantuan yang diberikan oleh Aliansi adalah sebesar USD 2 juta.[83]

Di luar itu, Indonesia mengupayakan penyelesaian konflik melalui forum-forum regional dan internasional, serta kerjasama bilateral dengan Myanmar. Salah satu tekanan Indonesia di dalam forum internasional adalah pentingnya mengajak dan melibatkan pemerintah Myanmar untuk bersama-sama melakukan upaya penyelesaian konflik. Hal ini didasari oleh tidak efektifnya rekomendasi maupun kesepakatan yang dicapai forum-forum internasional tanpa melibatkan pemerintah Myanmar.

> Di forum-forum internasional, kita selalu mengedepankan perspektif yang seimbang. Kita *nggak* bisa kenceng-kencengan ikut Barat, (bahwa) ini *human right*. Kita tidak bisa mengkondem begitu saja Myanmar secara keras, karena itu akan menutup akses kita untuk membangun *constructive agreement* dengan Myanmar. Padahal kita

---

[82] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

[83] "Menlu RI Serahkan Usulan Formula 4+1 untuk Rakhine State kepada State Counsellor Myanmar," *Kementerian Luar Negeri RI*, diakses pada 11 Desember 2018, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> selalu berpegang bahwa tidak ada inisiatif apapun atau rekomendasi apapun yang bisa dilaksanakan tanpa keterlibatan Myanmar.[84]

Di dalam forum regional, Indonesia terus-menerus melakukan usaha untuk mendapatkan akses bagi ASEAN untuk masuk dan ikut terlibat di dalam upaya penyelesaian masalah Myanmar. Sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah Myanmar, dan selanjutnya memudahkan repatriasi pengungsi. Selain itu, Indonesia juga terus mengupayakan sumber daya milik ASEAN, AHA Centre, agar mendapatkan akses masuk ke Myanmar, sehingga akan memudahkan penyaluran bantuan yang akan dikirim ke tempat pengungsian di Rakhine State.

Di forum multirateral OKI, pemerintah Indonesia di era Jokowi juga mendorong negara-negara Timur-Tengah untuk ikut serta membantu Rohingya. Hasilnya adalah kesanggupan Turki, Gambia, Qatar, dan Arab Saudi untuk bersama-sama membantu krisis yang sedang terjadi di Myanmar.[85] Walaupun kebijakan tersebut kurang strategis bagi pemerintah, setidaknya tetap menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia masih terus berkomitmen untuk peduli dan memberikan bantuan demi tercapainya penyelesaian konflik yang menimpa Rohingya.

Selanjutnya, OKI pun mendorong Myanmar untuk segera memberikan hak kewarganegaraan etnis Rohingya, serta membawa isu ini ke dalam konferensi tahunan dan membentuk tim pencari fakta untuk melihat dengan

---

[84] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

[85] "Di KTT OKI, RI Dorong Negara Timteng Bantu Rohingya," *Viva*, diakses pada 18 Desember 2018, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/631645-di-ktt-oki-ri-dorong-negara-timteng-bantu-rohingya/1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas permasalahan yang terjadi di Myanmar. Kemudian, OKI juga terlibat langsung dalam memfasilitasi bantuan logistik ke Rakhine State dan pos-pos pengungsian etnis Rohingya. Melalui proses diplomasi, pemerintah Myanmar memperbolehkan OKI masuk untuk mengirimkan bantuan. Terakhir, OKI berusaha untuk mengajak dialog umat Budha Myanmar dan memastikan bahwa OKI bukanlah organisasi agama, melainkan organisasi yang peduli terhadap isu kemanusiaan, terlepas dari apapun agamanya. OKI pun ikut berusaha mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik.[86]

Secara bilateral, Indonesia telah membuka akses bagi NGO untuk bisa menyalurkan bantuan ke Myanmar. Selain itu, ada pendekatan yang dilakukan dari militer ke militer. Pendekatan ini dilakukan agar dapat menularkan pengalaman Indonesia dalam melakukan reformasi militer kepada militer Myanmar. Sehingga kekuatan militer di Myanmar tidak menghambat proses demokratisasi di Myanmar yang memang masih dalam tahap transisi.[87]

Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Rohingya, pada dasarnya prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia merupakan faktor yang berperan penting dalam mendorong pemerintah berkomitmen untuk membantu warga Rohingya. Walaupun sebenarnya Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, Indonesia tetap

[86] Rr Tiara Ayu Dewinta, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013," *Journal of International Relations*, 2016, Vol. 2 No. 2, 127-134.
[87] Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu pengungsi terdampak konflik.[88] Kalau pun faktor *national interest* cukup mempengaruhi, kebijakan Indonesia terhadap konflik di Rakhine State tetap bersifat inklusif, tidak saja untuk kepentingan etnis muslim Rohingya tetapi juga untuk kepentingan komunitas Buddhist dan komunitas lainnya.

Selain itu, berbagai upaya yang dilakukan Indonesia pun selalu berprinsip pada moderatisme. Tidak ikut dalam arus gelombang kekuatan besar yang berperan dan mempengaruhi dinamika perkembangan di Myanmar, dan tetap berperan aktif dalam penyelesaian meskipun pada dasarnya tidak akan terdampak secara langsung dari apa yang tengah terjadi di Myanmar.

Hal ini menjadi relevan ketika mengistilahkan aksi Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi dalam aktifitas internasionalnya, khususnya yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan HAM di Myanmar, sebagai 'warga internasional yang baik' (*good international citizenship*).[89] Sebab ada komitmen etis untuk membantu krisis kemanusiaan yang menimpa warga negara lain melalui berbagai upaya penyelesaian, meski tetap mempertimbangkan kepentingan nasional.

Apa yang telah dirumuskan kemudian direalisasikan menjadi tindakan politik luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak serta-merta timbul begitu saja. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi dirumuskannya sebuah kebijakan luar negeri, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kepentingan nasional, keamanan nasional, kebutuhan nasional dan kecenderungan dan karakter pengambil keputusan (untuk

[88] Mohamad Rosyidin, "Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya," *Jurnal Analisis CSIS*, Kuartal Kedua 2015, Vol. 44 No. 2, hlm. 175.
[89] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya akan dibahas secara khusus pada poin ketiga). Sedangkan faktor eksternal meliputi segala kondisi luar negeri yang mendorong bahkan mengharuskan sebuah negara mengambil langkah politis strategis sebagai respon atas kondisi tersebut. Kondisi luar negeri ini pun diurai kembali menjadi kondisi regional kondisi internasional.

Dari kedua faktor tersebut, tidak selalu memiliki porsi yang sama. Akan ada faktor yang lebih dominan di antara faktor lainnya. Dalam kasus krisis Myanmar, kebijakan luar negeri Indonesia pada dasarnya lebih didorong oleh faktor internal yang meliputi *national interest*, kepentingan nasional dan pertimbangan keamanan nasional.

Pertama, kebutuhan nasional atau *national interest* adalah apa yang selama ini diaspirasikan oleh masyarakat Indonesia agar pemerintah terlibat dalam aktif penyelesaian konflik di Myanmar. Aspirasi yang tentu dapat dimaklumi, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, sedangkan kelompok yang menjadi korban dari keberlangsungan konflik tersebut adalah komunitas muslim Rohingya. Secara psikologis, masyarakat muslim Indonesia tidak ingin saudaranya sesama muslim menjadi korban atas tindakan kekerasan dan pembantaian yang selama ini dialamatkan kepada komunitas Rohingya. Psikologis yang demikian memunculkan perasaan bahwa penyiksaan yang dilakukan kepada muslim Rohingya juga melukai masyarakat muslim Indonesia.

Maka dari itu, telah banyak rangkaian aksi solidaritas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat muslim, sebagian besar diakomodir oleh organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial keagamaan, untuk: 1) mendorong pemerintah agar segera melakukan langkah-langkah strategis terhadap peritiwa yang bahkan hingga kini masih berlangsung; dan 2) menggalang dana untuk kemudian disalurkan sebagai bantuan bagi pengungsi yang terdampak konflik. Dua langkah itu bahkan dilakukan oleh masyarakat di hampir seluruh daerah di Indonesia. Membuktikan bahwa animo masyarakat begitu tinggi, dan dengan demikian mendorong pemerintah Indonesia mengakomodir kepentingannya.

Di sisi lain, sebagaimana fungsi *foreign policy* dalam konteks bantuan luar negeri,[90] Indonesia sebagai negara donatur dan inisiator bagi masuknya bantuan dana ke Myanmar, adalah bagian dari upaya membangun citra yang baik di hadapan dunia internasional, khususnya negara Asia Tenggara dan Myanmar. Citra tersebut merupakan modal bagi Indonesia untuk menaikkan levelnya menjadi negara terpandang dan disegani, dengan pertimbangan riwayat pengalaman dan sepak terjangnya dalam memediasi konflik, juga dalam mempromosikan perdamaian internasional.

Kepentingan tersebut juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan media dan pers, bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat internasional.[91] Hal tersebut merupakan langkah etis dalam membuat kebijakan yang harus mengedepankan unsur rasional dalam implementasi keputusan pemberian

[90] K.J. Holsti, *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* (University of British Columbia, 2012), 222.
[91] Hal tersebut juga berkaitan dengan keputusan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai perhelatan acara berlevel internasional. Lihat, https://youtu.be/0J5Dlrpoog4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan luar negeri.[92] Sehingga, kepedulian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Myanmar selain atas dasar kemanusiaan, juga menjadikannya momentum bagi Indonesia untuk membangun citra sebagai negara yang mempunyai pengaruh, khususnya dalam penyelesaian kasus kemanusiaan dan pelanggaran HAM.

Dalam konteks keamanan nasional, berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga bertujuan untuk mengantisipasi segala macam resiko yang akan timbul dari berlangsungnya krisis Rohingya, dan akan mengancam sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara. Ancaman yang akan dihadapi jika krisis tak segera diatasi adalah terbengkalainya pengungsi, baik yang terdampar di tengah laut maupun di kamp-kamp pengungsian, dengan ancaman lanjutan berupa *human trafficking*, terorisme, perdagangan narkotika, dan potensi terjadinya *civil war*. Sekian ancaman tersebut dapat memunculkan berbagai persoalan baru di tengah stabilitas yang sedang dibangun oleh pemerintah Indonesia pasca rangkaian aksi terorisme yang melanda Indonesia dan sebagian besar negara di dunia.

Di sektor ekonomi, langkah Indonesia untuk mengupayakan penyelesaian konflik di Myanmar juga merupakan bagian dari langkah protektif terhadap investasi yang telah dilakukan Indonesia di Myanmar. Terhitung sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo tahun 2014, Indonesia telah mendorong investasi Indonesia di Myanmar, khususnya di tiga sektor: pertambangan, telekomunikasi, dan infrastruktur. Selanjutnya,

[92] Mark R. Amstutz, *Op. Cit*, 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia juga akan menjajaki kerja sama dengan Myanmar di dua sektor lain, yakni sektor perhubungan dan sektor perbankan.[93]

Kedua, faktor eksternal yang meliputi: 1) kondisi lingkungan strategis di Asia Tenggara serta kepentingan dan ujian kredibilitas ASEAN; 2) tekanan dunia internasional. Di lingkungan regional, tidak terbantahkan lagi, bahwa sejak berlangsungnya konflik hingga krisis yang kini terus melanda Myanmar, berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di Asia Tenggara. Akan tetapi, situasi yang krisis itu tidak segera direspon oleh ASEAN. Peneliti menilai, bahwa dalam hal ini, ASEAN sangat lemah dalam mengupayakan penyelesaian secara menyeluruh bagi konflik di Myanmar.

Padahal ASEAN sendiri mempunyai program-program strategis untuk negara-negara anggota, yang berpotensi tidak terealisasi dengan baik jika konflik di Maynmar masih terus berlangsung. Instabilitas di Myanmar sebagai salah satu anggota ASEAN sudah pasti menunda terealisasinya program, lebih-lebih program dengan proyeksi jangka panjang.

Salah satu program strategisnya adalah *ASEAN Community* (Masyarakat ASEAN), yang didirikan untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu masyarakat negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Masyarakat ASEAN meliputi tiga pilar, yaitu Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*), Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic*

[93] Tempo, "Jokowi: Indonesia Investasi 3 Sektor di Myanmar," *Tempo*, 12 November 2014, diakses pada 4 Januari 2019, https://dunia.tempo.co/read/621420/jokowi-indonesia-investasi-3-sektor-di-myanmar/full&view=ok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Community/AEC), dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*). Ketiga pilar itu terikat secara erat dan saling memperkuat untuk mewujudkan perdamaian, kestabilan dan kesejahteraan bersama yang abadi. Program tersebut kemudian dilanjutkan hingga 2030 melalui *Declaration On The ASEAN Community's Post 2015 Vision* dalam KTT ASEAN ke-23 pada 9-10 Oktober 2013, dengan komitmen untuk merumuskan lagi visi Masyarakat ASEAN Pasca 2015.[94]

Namun dengan mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi di Myanmar, maka segala upaya yang telah diagendakan dalam program Masyarakat ASEAN menjadi berantakan. Perdamaian dan stabilitas yang selama ini diredam pada akhirnya pecah, dan mengharuskan adanya evaluasi ulang bagi realisasi Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN. Apalagi pilar tersebut merupakan pilar paling fundamental dan berpengaruh bagi pelaksanaan dua pilar Masyarakat ASEAN yang lain, yakni Pilar Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN dan Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kelemahan dan keterlambatan ASEAN dalam merespon isu Rohingya mengharuskan Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh dan berkepentingan di Asia Tenggara, terutama dalam keanggotaan ASEAN, untuk mengembalikan stabilitas Asia Tenggara, salah satunya dengan ikut aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya. Lemahnya ASEAN dalam upaya penyelesaiaan konflik Rohingya juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk

[94] "Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN," *Kementerian Luar Negeri RI*, 17 Maret 2015, diakses pada 4 Januari 2019, https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seintensif mungkin membantu penyelesaian konflik di Myanmar, dengan tujuan agar stabilitas di Asia Tenggara kembali pulih.

Selain absennya ASEAN, krisis tersebut juga menjadi alasan bagi Indonesia untuk lebih "berkeringat" dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar, mengingat banyak kepentingan Indonesia yang dipertaruhkan dalam Masyarakat ASEAN. Beberapa di antaranya tercantum dalam elemen-elemen pokok *ASEAN Community's Post 2015 Vision*.[95]

Dalam lingkungan global, sebagaimana penjelasan Denny Abdi,[96] ASEAN dan juga negara-negara di Asia Tenggara (*include* Indonesia) sedang menghadapi ujian kredibilitas setelah masyarakat internasional menganggap bahwa ASEAN dan masyarakat Asia Tenggara terkesan membiarkan krisis di Myanmar terus-menerus berlangsung dengan dalih tunduk pada prinsip non-intervensi.[97] Bahkan, selama ini banyak dari para pegiat HAM dan diplomat Barat telah mengkritik penerapan prinsip non-intervensi ASEAN karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan geopolitik kawasan.[98]

Ujian kredibilitas yang dihadapi ASEAN setelah krisis kepercayaan internasional, pada saat yang sama memunculkan harapan yang sangat besar di kalangan masyarakat internasional terhadap Indonesia untuk dapat dan mampu berperan dalam penyelesaian krisis di Myanmar, setelah sebelumnya berhasil membuka akses bantuan ke Myanmar melalui jalur diplomasi.

---

[95] Ibid.
[96] Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam Wawancara pada 28 November 2018.
[97] Lihat, The ASEAN Charter, Chapter I, Article 2, point 2 (a).
[98] Heyder Affan, "Krisis Rohingya, mengapa ASEAN tidak mampu berperan?" *BBC Indonesia*, 6 September 2017, diakses pada 4 Januari 2019, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dorongan tersebut tentu semakin memotivasi Indonesia untuk "unjuk kebolehan" di tengah ketidak mampuan organisasi regional macam ASEAN, bahkan juga sub-organ PBB. Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagus bagi terealisasinya kehendak Presiden Jokowi dalam mengarahkan politik luar negeri Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang membangun *trust*.

Ketiga, pengambil keputusan, dalam hal ini Presiden Jokowi. Sebagaimana penjelasan K.J. Holsti, bahwa kebijakan luar negeri juga tidak bisa lepas dari pengaruh pengambil keputusan yang meliputi nilai-nilai dari seorang pemimpin atau pengambil keputusan sebagai ideologinya, pengalaman hidupnya, masa kecilnya, latar belakang pendidikannya, segala sesuatu yang mempengaruhi persepsinya, karakter, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang mempengaruhi persepsi, preferensi dan reaksi atau respon seorang pengambil keputusan, sehingga membedakan ia dengan pengambil keputusan lainnya.[99]

Dalam memandang kebijakan Indonesia terhadap isu Rohingya, kita harus memandang karakter kepemimpinan Jokowi yang populistik. Bahkan sejak menjadi Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarata, sampai akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia, karakter populis telah menjadi identitasnya. Salah satu yang paling memperlihatkan karakter kepopulisan Presiden Joko Widodo adalah *blusukan*.[100] Bahkan melalui *blusukan* ini pula,

[99] K.J. Holsti dalam Eugene R. Charles Wittkoff, dkk, *American Foreign policy*, Sixth Edition (United States: Thomson Wadsworth, 2003), 16-19.
[100] Istilah Jawa yang berarti "masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu." Lihat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dalam konteks politik, *blusukan* berarti turun langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit-banyak telah menjadi faktor kemenangannya pada Pemilu Presiden 2014.

Dalam aktifitas eksekutifnya di level nasional, banyak sekali program-program maupun kebijakan publik yang mempunyai kecenderungan sama dengan karakter kepemimpinan Joko Widodo. Paling mutakhir (2018) adalah kebijakan mempertahankan harga BBM dan tarif listrik di tengah melemahnya nilai matauang rupiah, bahkan memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM dan tarif listrik hingga 2019. Kemudian menambah komponen THR bagi PNS, dan untuk pertama kalinya juga diberikan kepada pensiunan PNS.[101]

Dari beberapa contoh di atas, menjadi terang bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan ikut terlibat aktif dalam penyelesaian konflik Rohingya adalah tidak lepas dari kecenderungan Presiden Jokowi—sebagai pengambil keputusan—yang populis, untuk mengakomodir aspirasi sebagian besar masyarakat, khususnya kelompok muslim, yang menginginkan agar Indonesia terlibat aktif dalam upaya-upaya strategis terhadap penyelesaian konflik serta memberikan perlindungan terhadap kelompok etnis Rohingya. Bahkan, sebagaimana pengakuan Dewi Lestari, Presiden Jokowi juga menyempatkan diri untuk *blusukan* di kamp-kamp pengungsian, untuk melihat dan memberikan bantuan secara langsung

---

atau bahkan ikut melibatkan diri di dalam aktifitas 'masyarakat bawah' di tempat mereka bekerja, seperti pasar, sawah, ladang, pesisir, dan lain sebagainya.

[101] Sudrajat, "6 Kebijakan Populis Jokowi," *Detik*, 24 Mei 2018, diakses pada 4 Januari 2019, https://finance.detik.com/infografis/d-4036576/6-kebijakan-populis-jokowi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada para pengungsi, serta meninjau progres pembangunan sekolah dan rumah sakit bantuan Indonesia.[102]

Selain itu, sentimen negatif yang dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin yang anti-Islam sejak kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mantan Wakil Gubernur Jokowi di DKI Jakarta, pada tahun 2016 juga tak kalah berperan dalam pengambilan keputusan luar negeri. Kebijakan luar negeri Indonesia dengan terlibat aktif di dalam upaya dan proses resolusi konflik di Myanmar yang menimpa kelompok etnis muslim Rohingya—juga masyarakat muslim dalam konteks krisis Palestina, dan dalam konteks kasus lainnya yang serupa—adalah tindakan politik yang mendorong upaya pemulihan nama baik Presiden Joko Widodo di mata masyarakat muslim, dengan cara bersikap responsif dan kooperatif dalam mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka.

Kita juga perlu memperhatikan latar belakang Presiden Jokowi, sebelum terjun di dalam dunia politik, yang merupakan seorang pengusaha.[103] Sehingga karakter wirausahawan juga menjadi identitas Presiden Joko Widodo dalam mengambil keputusan dengan, misalnya mempertimbangkan laba, mempertimbangkan rugi, ataupun pertimbangan bisnis lainnya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi Indonesia melalui investasi yang dari tahun ke tahun nilainya semakin meningkat. Maka langkah protektif

---

[102] Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam Wawancara pada 28 November 2018.

[103] Kurniawati Hasjanah, "Sebelum Menjadi Presiden, Jokowi Merintis Usaha Bisnis Mebel, Begini Sekilas Perjuangannya," *Tribun Jakarta*, 1 Mei 2018, diakses pada 16 Januari 2019, http://jakarta.tribunnews.com/2018/05/01/sebelum-menjadi-presiden-jokowi-merintis-usaha-bisnis-mebel-begini-sekilas-perjuangannya#gref.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Indonesia dengan mendorong pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri konflik sekaligus krisis yang terjadi, merupakan langkah rasional bagi seorang Joko Widodo sebagai pengambil keputusan.

Juga dengan berbagai potensi ancaman, sebagai implikasi dari berlangsungnya krisis Rohingya, akan mengganggu stabilitas ekonomi, politik dan keamanan secara regional maupun nasional. Maka tentu, jika ancaman tersebut benar-benar terjadi, menjadi bahaya sekaligus kerugian yang tiada tara. Sebab untuk menyelesaikan masalah baru yang timbul dari berlangsung krisis Rohingya juga akan menguras banyak anggaran (modal). Dengan demikian, maka tidak heran jika pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mengambil sebuah keputusan yang didasari oleh logika pasar, yakni meminimalisir potensi kerugian nasional yang diakibatkan jika konflik di Myanmar tak kunjung terselesaikan.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, terlalu riskan bagi Indonesia untuk bersikap pasif dan tak melibatkan diri di dalam upaya dan proses penyelesaian Rohingya. Sebab pada satu sisi, krisis di Myanmar dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menjawab tantangan internasional sekaligus kesempatan bagi Indonesia membangun kepercayaan internasional. Sedang pada di sisi yang lain, akan ada berbagai macam ancaman sekaligus menjadi kerugian nantinya, jika krisis tersebut tak segera diusaikan.

B. Indonesia dan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

1. Peta Politik dalam Konflik Myanmar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk melihat posisi Indonesia dalam konteks keterlibatannya terhadap proses penyelesaian konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar, peneliti perlu menjelaskan peran negara-negara *the big power* dalam perkembangan dinamika konflik yang hingga kini terus berlanjut. Terdapat dua kekuatan besar yang saling mempengaruhi.

> Di satu sisi, ada China yang mem-*back up* Myanmar dari sisi ekonomi dan jaminan keamanan. Di sisi lain, negara-negara Barat mengkondem tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan kelompok militer Myanmar.[104]

Jaminan ekonomi dan keamanan oleh China untuk Myanmar, bahkan kesediaan China menggunakan hak veto jika isu ini menjadi pembahasan di dalam forum Dewan Keamanan PBB, adalah berkaitan dengan investasi besar-besaran China untuk Myanmar, seperti proyek pembangunan *pipeline* di Rakhine State yang ditarik sampai ke daerah Kunming. Bahkan, berdasar pada dugaan Dewi Lestari, China juga sedang membangun semacam pelabuhan yang disinyalir menjadi bagian dari proyek pembangunan pangkalan militer di Myanmar.[105]

China juga tak pernah hirau akan seruan internasional bahwa upaya genosida militer Myanmar terhadap komunitas etnis Rohingya adalah pelanggaran kemanusiaan dan HAM. Sebab, China yang penguasanya berasal dari Partai Komunis, memang dikenal sangat apatis terhadap keberadaan muslim. Sikap yang sama juga ditunjukkan China dalam kasus komunitas muslim Uighur di provinsi Xinjiang yang dianggapnya radikal.

---

[104] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

[105] Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam wawancara pada 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga tidak heran jika China membiarkan persekusi yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya.[106]

Terlepas dari ketergantungan Myanmar terhadap pengaruh China, dinamika konflik dan krisis Rohingya juga menyebabkan pemerintah Myanmar berada dalam tekanan negara-negara Barat agar segera mengakhiri kejahatan yang dilakukan oleh junta militernya. Peringatan bahkan berujung pada sanksi, seperti sanksi militer yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada empat komandan militer dan kepolisian serta dua unit militer Myanmar lainnya. Di bidang ekonomi, sanksi Amerika Serikat adalah dengan memperketat bantuan keuangan yang masuk ke Myanmar.[107]

Selain sanksi, Amerika Serikat juga sedang mempersiapkan pembentukan tim pencari fakta atas tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine. Bahkan Amerika juga mendesak pemerintah Myanmar untuk memberikan hak kewarganegaraan penuh kepada masyarakat Rohingya agar mereka bisa mendapatkan akses pelayanan yang merata sebagaimana warga negara lainnya.

Di tengah *pressing* yang terus dilakukan kepada pemerintah Myanmar, Amerika Serikat juga mengupayakan perlindungan terhadap para pengungsi terdampak konflik, dengan melarang Bangladesh agar

---

[106] M. Fathoni Hakim, "Multy-Track Diplomacy dalam Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar: Sebuah Analisis terhadap Diplomasi Indonesia," (Laporan Penelitian—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 60.

[107] Choirul Aminuddin, "Amerika Serikat Beri Sanksi Militer ke Myanmar Terkait Rohingya," *Tempo*, 18 Agustus 2018, diakses pada 6 Januari 2019, https://dunia.tempo.co/read/1118229/amerika-serikat-beri-sanksi-militer-ke-myanmar-terkait-rohingya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dulu memulangkan para pengungsi ke Myanmar, di samping juga memfasilitasi kebutuhan pendidikan bagi pengungsi anak-anak.[108]

Berdasar pada kenyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Myanmar menjadi isu yang "seksi" bagi negara-negara *the big power* untuk dieksploitasi dan dijadikan lahan untuk beradu kepentingan. Seperti Amerika Serikat dan China sebagai dua negara besar, menjadikan isu Rohingya sebagai pembenaran bagi upaya untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, dan sekaligus menjadikan isu tersebut sebagai alasan untuk menancapkan pengaruhnya di mata masyarakat internasional.

Konflik kepentingan antara negara-negara *the big power* dalam menyikapi isu Rohingya pada tahap selanjutnya mempengaruhi opini internasional, di mana konflik kepentingan tersebut mengantarkan masyarakat internasional dalam memandang isu Rohingya ke situasi yang tak sepaham. Situasi demikian akhirnya menjadi faktor lambatnya proses penyelesaian konflik di Myanmar yang kompleks itu.

2. Prinsip Bebas dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Di tengah bipolaritas kekuatan negara-negara *big power* dalam mempengaruhi pemerintah Myanmar untuk menyikapi krisis Rohingya, sikap politik Indonesia terhadap konflik yang terjadi di Myanmar adalah dengan tidak bergantung kepada negara atau kekuatan manapun.

[108] Sidhu & Parnini dalam Gonda Yumitro, "Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya," *Jurnal Sospol*, Juli-Desember 2017, Vol. 3 No. 2, 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pernyataan Denny Abdi, “Indonesia tetap bersikap moderat, serta berperan aktif demi terwujudnya perdamaian di Myanmar.”[109]

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Indonesia selalu menekankan bahwa pemerintah Myanmar harus dilibatkan di dalam perumusan resolusi, baik di dalam forum-forum regional maupun internasional. Langkah tersebut adalah jalan tengah di antara dua sikap yang dominan selama ini: 1) pasif dan membiarkan, atau bahkan cenderung ‘merestui’ tindak kekerasan militer Myanmar seperti gelagat yang diperlihatkan oleh China; dengan 2) terlalu keras dengan terus-menerus memberikan tekanan kepada pemerintah Myanmar seperti yang selama ini ditunjukkan oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat.

Kedua sikap itu pun tak pernah menghasilkan keputusan yang tepat. Kalaupun ada, seperti dalam kesepatan repatriasi pengungsi, tak pernah mengalami progres yang bagus, dan malah berhenti di tengah jalan. Dengan begitu, maka usulan yang selama ini disuarakan Indonesia di dalam forum-forum regional maupun internasional, menjadi yang paling efektif di tengah kompleksitas persoalan yang terjadi di Myanmar, sekaligus mencerminkan kebebasan pandangan dan sikap politik luar negeri Indonesia dengan tidak berpihak kepada negara maupun kekuatan manapun yang berkepentingan terhadap konflik yang terjadi di Myanmar.

[109] Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan begitu, peneliti pun menilai bahwa prinsip bebas masih dipegang teguh oleh pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri untuk merespon isu Rohingya di Myanmar. Meskipun prinsip tersebut merupakan prinsip yang muncul di masa sistem global yang masih bipolar, pada nyatanya tetap relevan untuk dijadikan prinsip politik luar negeri di tengah sistem global yang multipolar.

3. Prinsip Aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia

Indonesia telah memutuskan untuk ikut serta di dalam proses penyelesaian konflik, penyelesaian krisis, hingga resolusi perdamaian di Myanmar. Keputusan tersebut direalisasikan melalui berbagai macam tindakan, sebagaimana pada bab sebelumnya, yang dilakukan secara serius dan konsisten. Konsistensi Indonesia di dalam upaya penyelesaian konflik adalah wujud dari prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

"aktif" dalam artian, tidak setengah hati dalam merealisasikan keputusan dan komitmen politik terhadap isu Rohingya. Tidak seperti Thailand dan beberapa negara anggota ASEAN lain misalnya, yang menyikapi isu Rohingya secara pasif dengan dalih memegang teguh prinsip non-intervensi ASEAN. Padahal telah jelas bahwa di dalam piagam tersebut, di bab dan poin yang sama, diprinsipkan dan dikomitmenkan bersama untuk menjaga perdamaian kawasan.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi dalam memaknai prinsip "aktif" di dalam politik luar negeri juga terlihat dari intensitas pemerintah, baik melalui Menteri Luar Negeri maupun Presiden secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung, dalam ikhtiar penyelesaian krisis di Myanmar. Hampir semua jalur telah ditempuh, mulai dari diplomasi, kerjasama bilateral, multilateral, forum regional, forum internasional, forum solidaritas, berkolaborasi dengan NGO dan lain sebagainya. Upaya-upaya yang dilakukan juga tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan secara parsial, tetapi dengan memperhatikan akar persoalan, sehingga dapat benar-benar mencapai tujuan yang selama ini dicita-citakan bersama, yakni perdamaian.

Sama halnya dengan prinsip bebas, prinsip aktif ini pun masih tetap dipakai oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Relevansi prinsip aktif di dalam politik luar negeri Indonesia tercermin di dalam amanat konstitusi, seperti dalam Pembukaan UUD 1945, yang hingga kini belum berubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dalam merespon isu Rohingya sebagai wujud dari kebijakan luar negerinya, meliputi: pengajukan proposal Formula 4+1 untuk Rakhine State, penyaluran bantuan (*emergency relief*) kepada pengungsi, peluncuran Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) atau Indonesian Humanitarian Assistance (IHA), dan penyelesaian konflik melalui forum-forum regional dan internasional, serta kerjasama bilateral dan multirateral. Dari uraian demi uraian kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu Rohingya, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, mulai dari faktor internal, faktor eksternal, sampai dengan aktor pengambil keputusan. Faktor internal, meliputi: 1) *national interest*, yang tercermin dari dorongan sebagian besar masyarakat Indonesia agar pemerintah Indonesia segera mengupayakan penyelesaian konflik dan melindungi komunitas etnis Rohingya; 2) kepentingan nasional, yang menjadikan konflik Rohingya sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional; dan 3) proteksi negara, untuk mengantisipasi ancaman dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

implikasi yang dihasilkan oleh konflik, baik dalam aspek *teritorial security* maupun ekonomi.

Secara eksternal, ujian kredibiltas ASEAN yang selama ini dianggap tidak melakukan langkah konkret, serta tekanan internasional terhadap negara-negara kawasan—terutama anggota ASEAN—atas apa yang terjadi di Myanmar, menjadi faktor yang juga mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu Rohingya. Selain itu, kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor pengambil keputusan, melalui pertimbangan-pertimbangan rasional seorang Presiden Jokowi yang dikenal sebagai pemimpin yang berkarakter populis dan berlatar belakang pengusaha.

Kedua, kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu Rohingya menggambarkan bagaimana pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi menerjemahkan prinsip bebas-aktif, yaitu dengan tidak bergantung dan berpihak kepada bipolaritas kepentingan negara-negara *big power*, baik itu China maupun Amerika Serikat, dalam perkembangan dinamika konflik di Myanmar. Upaya dan langkah pemerintah Indonesia adalah dengan bersikap moderat (bukan berarti netral) dan tidak setengah hati dalam merealisasikan kebijakan luar negeri melalui komitmen tinggi dan konsisten memperjuangkan penyelesaian konflik di Myanmar secara menyeluruh.

B. Saran

Untuk memperkuat upaya penyelesaian konflik di Myanmar, penting bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama bilateral di bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

militer dengan pemerintah Myanmar dengan maksud agar pengalaman reformasi militer di Indonesia dapat menjadi salah satu contoh untuk diterapkan. Sehingga dominasi peran militer di dalam politik dan pemerintahan di Myanmar dapat dikendalikan dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agung, Ide Anak Agung Gde. *Twenty Years Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Paris: Mouton-The Hague.

Aidit, D.N. (1963) *PKI dan AURI*. Jakarta: Jajasan Pembaharuan.

Bungin, Burhan. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif: Aktuaisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Coplin, William D. (1992) *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru.

Departemen Penerangan RI. (1959) *Manifesto Politik Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

Hatta, Mohammad. (1976) *Mendayung di Antara Dua Karang*. Jakarta, Bulan Bintang.

Holsti, K.J. (1992) *Politik International: Suatu Kerangka Analisis*, Terj. Wawan Juanda. Bandung: Bina Cipta.

_____. (2012) *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy*. University of British Columbia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar. (1982) *Bung Hatta Kita dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Idayu.

Leifer, Michael. (1989) *Indonesia's Foreign Policy*, Penerj. A. Ramlan Surbakti, *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Muhadjir, Noeng. (1996) *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarsin.

Nurbuko, Cholid, dan Abu Ahmadi. (1997) *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suharsimi, Arikunto. (2005) *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wittkoff, Eugene R. Charles, dkk., (2003) *American Foreign policy*, Sixth Edition. United States: Thomson Wadsworth.

Wuryandari, Ganewati. (2008) *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majalah

Redaksi Prisma, "Politik Luar Negeri dan Dilema Ketergantungan dari Sukarno sampai Suharto", *Prisma*, 1977, No. 9 Tahun VI.

Tim Redaksi, "Rohingya: antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan", *Masyarakat ASEAN*, Media Publikasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Edisi 8 / Juni 2015.

Wawancara

Wawancara, Denny Abdi, Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

Wawancara, Dewi Lestari, Wakil Direktur Asia Tenggara, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia, 28 November 2018.

Makalah dan Laporan Penelitian

Agus Budi Yulianto, "Konsep Politik Luar Negeri Bebas Aktif Dalam Konfrontasi Indonesia Malaysia Tahun 1963-1966 (Sebuah Kajian Historis)", (Skripsi—Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008).

Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Desember 2014, Vol. IV, No. II.

Baiq Wardhani, "No Place Called Home: Pengungsi Rohingya di Perbatasan Bangladesh-Myanmar", *Jurnal Global dan Strategi: Edisi Khusus*, 2012.

J. Soedjati Djiwandono, "Empat Puluh Tahun Politik Luar Negeri Indonesia: Perubahan dan Kesinambungan", *Analisa*, 1985, No. 8.

M. Fathoni Hakim, "Multy-Track Diplomacy dalam Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar: Sebuah Analisis terhadap Diplomasi Indonesia," (Laporan Penelitian—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Mohamad Rosyidin, "Etika Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Isu Rohingya," *Jurnal Analisis CSIS*, Kuartal Kedua 2015, Vol. 44 No. 2.

Novandre Satria & Ahmad Jamaan, "Islam dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Peran Indonesia dalam Konflik di Rakhine Myanmar," *Jurnal Transnasional*, Juli 2013, Vol. 5 No. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rr Tiara Ayu Dewinta, "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Menangani Konflik Etnis Rakhine-Rohingya di Myanmar Tahun 2012-2013," *Journal of International Relations*, 2016, Vol. 2 No. 2.

Sidhu & Parnini dalam Gonda Yumitro, "Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya," *Jurnal Sospol*, Juli-Desember 2017, Vol. 3 No. 2.

Yanyan Mochamad Yani, "Politik Luar Negeri," Makalah dalam ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando TNI AU Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

Dokumen Hukum

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.

The ASEAN Charter.

Undang-Undang Dasar 1945.

Jurnal Online

Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2017, Vol. 2, No. 2, P3M STAIN Curup-Bengkulu. Diakses melalui, http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF.

Journal of International Relations, 2015, Vol. 1, No. 2. Diakses melalui http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi.

K.J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", 1970, Vol. 14, No. 3, 233-309. Diakses pada http://maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Holsti.pdf.

Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2017, Vol. 4, No. 3. Diakses melalui http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/14929.

Repository Universitas Hasanuddin Makassar, http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25716.

Situs Online

BBC Indonesia, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41160293.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Detik, https://finance.detik.com/infografis/d-4036576/6-kebijakan-populis-jokowi.

DW, http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421.

Historia, https://historia.id/mondial/articles/rohingya-yang-kian-tersingkir-vqr50.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Default.aspx.

Kementerian Luar Negeri RI, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx.

Kementerian Luar Negeri RI, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Menlu-RI-Serahkan-usulan-Formula-41-untuk-Rakhine-State-kepada-State-Counsellor-Myanmar.aspx.

Kementerian Luar Negeri RI, https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Sejarah-dan-Latar-Pembentukan-ASEAN.aspx.

Kementerian Luar Negeri RI, https://www.kemlu.go.id/newdelhi/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/Biju-Patnaik,-Pahlawan-Bersama-India,-Indonesia.aspx.

Kementerian Luar Negeri, https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/sejarah/Pages/Perkembangan-Kementerian-Luar-Negeri.aspx.

Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2017/09/06/06410621/jangan-lihat-isu-rohingya-sebagai-konflik-antara-islam-dan-buddha?page=all.

Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/13513321/indonesia-dorong-kebijakan-repatriasi-bagi-pengungsi-rohingya-di-banglades.

Kompas, https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/17563621/politik-luar-negeri-jokowi-jk-dalam-4-tahun-apa-saja-pencapaiannya?page=all.

Republika,https://www.republika.co.id/berita/internasional/asean/13/04/03/mko44s-perdagangan-indonesiamyanmar-ditarget-sentuh-1-miliar-dolar-as?fb_comment_id=639344356092283_7865519.

Tempo, https://dunia.tempo.co/read/1118229/amerika-serikat-beri-sanksi-militer-ke-myanmar-terkait-rohingya.

Tempo, https://dunia.tempo.co/read/621420/jokowi-indonesia-investasi-3-sektor-di-myanmar/full&view=ok.

Tempo, https://nasional.tempo.co/read/1054962/presiden-jokowi-temui-etnis-rohingya-di-tempat-pengungsian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tirto, https://tirto.id/krisis-rohingya-bukan-konflik-agama-cv3i.

Tribun Jakarta, http://jakarta.tribunnews.com/2018/05/01/sebelum-menjadi-presiden-jokowi-merintis-usaha-bisnis-mebel-begini-sekilas-perjuangannya#gref.

Viva, http://dunia.news.viva.co.id/news/read/631645-di-ktt-oki-ri-dorong-negara-timteng-bantu-rohingya/1.

Youtube, https://youtu.be/0J5Dlrpoog4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id